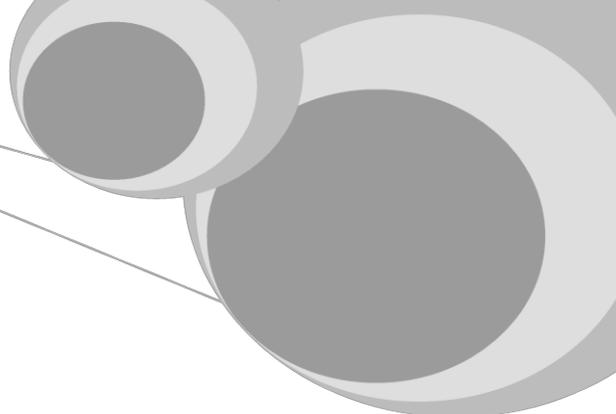


# IMPLEMENTASI STANDAR PENILAIAN AKREDITASI PRODI

Muhammad Rahmatullah - Eka Hendry AR  
Mansur - Isyatul Mardiyati - Midyan Surya Ishak

Editor :  
Muhamad Tisna Nugraha





# **Implementasi Standar Penilaian Akreditasi Prodi**

Penyusun : Muhammad Rahmatullah  
Eka Hendry AR  
Mansur  
Isyatul Mardiyati  
Midyan Surya Ishak

Editor : Muhamad Tisna Nugraha

Penata Letak : Irma Dewi Meilinda, S. Kom

Desain Sampul : Ardiansyah

ISBN : 978-602-61369-0-9

Publishing :  
Content HVS 70 Gram Paper Line  
Page xii + 108, Size 14,8 cm x 21 cm

Penerbit  
CV. M-Brother  
Jalan Prof M. Yamin Gang Pemangkat I Pontianak

Dilarang keras mengutip, menjiplak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini serta memperjualbelikannya tanpa izin tertulis dari penulis. Isi di luar tanggungjawab percetakan.

*All right reserved © 2017*





## Selayang Pandang

Lembaga Perguruan Tinggi di Indonesia berperan strategis dalam rangka menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang sesuai dengan kriteria Standar Penilaian Akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Standar tersebut juga berlaku di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) khususnya FTIK IAIN Pontianak sebagai pilihan di mana Fakultas Keislaman yang berstatus negeri se-Kalimantan Barat.

Standar Penilaian Akreditasi Program Studi Sarjana ini merupakan standar untuk menjamin agar pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan standar nasional yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik Perguruan Tinggi Umum (PTU), maupun Perguruan Tinggi Agama (PTA). Berdasarkan hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut implementasi standar penilaian akreditasi program studi sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang dilaksanakan di FTIK IAIN Pontianak.

Untuk itu tim penulis kemudian melakukan serangkaian penelitian dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang pelaksanaan standar pendidikan, dan pembelajaran di lingkungan FTIK IAIN Pontianak, meliputi;

- 1) Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaiannya;
- 2) Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu;
- 3) Mahasiswa, dan lulusan;

- 4) Sumber daya manusia;
- 5) Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik;
- 6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi;
- 7) Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama.

Bentuk penelitian yang tim penulis lakukan menggunakan jenis penelitian deskriptif, dan pendekatan kuantitatif berupa persentase. Pengumpulan data yang diperoleh peneliti berasal dari *Questioner*/ angket, dan observasi dengan penelitian berlangsung. Adapun pengambilan sampel dilakukan melalui metode total sampling di mana jumlah sampel penelitian sama dengan jumlah populasi sebelumnya, yakni terhadap 215 orang responden terdiri atas mahasiswa, karyawan, dan dosen di FTIK IAIN Pontianak.

Berdasarkan paparan data hasil penelitian dapat disimpulkan oleh penulis bahwa implementasi standar penilaian akreditasi program studi sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) di FTIK IAIN Pontianak Meskipun tidak ada beberapa komponen terdapat berbagai kendala seputar pelaksanaan. Hal ini tidak menjadi permasalahan, dan terus menerus dapat diselesaikan melalui suatu solusi secara bersama dengan semaksimal mungkin.

**Kata Kunci :** *Implementasi dan Standar Penilaian Akreditasi Program Studi Sarjana BAN-PT*



## Kata Pengantar

Assalamu, al. Pujikan syukur kami panjatkan kepada Allah Swt. atas segala rahmat, kenikmatan, kemudahan, dan hidayah yang telah diberikan. Sehingga, tulisan yang berjudul "Implementasi Standar Penilaian" dapat penulis selesaikan tepat waktu. Selanjutnya, penulis menghaturkan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam membantu penyelesaian tulisan yang pada awalnya berangkat dari hasil penelitian penelitian kami, terutama kepada :

1. Dr. H. Hamka Siregar, M.Ag selaku Rektor IAIN Pontianak;
2. Dr. Lailial Muhtifah, M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah, dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Pontianak;
3. Rekan-rekan dosen di lingkungan FTIK IAIN Pontianak serta;
4. Seluruh responden penelitian yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu dalam kesempatan ini atas kerjasama dan partisipasinya dalam penelitian ini.

Penulis masih berupaya agar hasil penelitian yang sudah dalam bentuk tulisan ini dapat mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Sehingga, kritik, dan saran yang dibutuhkan bagi penulis agar dapat membangun demi kesempurnaan tulisan di masa-masa yang akan datang. Hanya kepada Allah Swt. Tim penulis haturkan. dan semoga tulisan ini bermanfaat. Wassalamu Alaikum Wr . Wb .

**Pontianak, April 2017**  
**Tim Penulis**

# Daftar Isi



	<b>Halaman</b>
<b>Selayang Pandang</b> .....	v
<b>Kata Pengantar</b> .....	vi
<b>Daftar Isi</b> .....	viii
<b>Daftar Gambar dan Bagan</b> .....	xi
<b>Daftar Tabel</b> .....	xii

## **BAB I Pendahuluan**

A. Latar Belakang .....	1
B. Masalah .....	4
C. Tujuan .....	5
D. Manfaat .....	5

## **BAB II Kajian Teori**

A. Implementasi Kebijakan Pendidikan .....	7
1. Pengertian Implementasi .....	7
2. Kebijakan Pendidikan .....	9
3. Implementasi dalam Kebijakan Pendidikan .....	11
4. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan .....	16
B. Pengertian Standar Penilaian Akreditasi Program Studi Sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) .....	18
1. Implementasi Standar Mutu Perguruan Tinggi .....	21
2. Evaluasi Implementasi Standar Mutu atau Manajemen .....	21

Kendali Mutu di Perguruan Tinggi .....	26
C. Delapan Standar Pendidikan dan Pembelajaran di Lingkungan FTIK IAIN Pontiank .....	27
D. Model-Model Evaluasi Program .....	48
1. Pengertian Program .....	48
2. Model-Model Evaluasi Program .....	50
3. Evaluasi Program Model CIPP ( <i>Context, Input, Process and Product</i> ) .....	53

### **BAB III Metodologi**

A. Metode Penelitian .....	57
1. Objek Penelitian .....	58
2. Jenis Penelitian .....	59
B. Sumber Data .....	60
1. Data Primer .....	60
2. Data Sekunder .....	61
3. Penentuan Informan .....	61
C. Teknik Pengumpulan Data .....	61
1. <i>Queisioner</i> .....	61
2. Teknik Komunikasi Langsung .....	62
3. Teknik Dokumentasi .....	62
4. Instrumen Penelitian .....	62
D. Teknik pengolahan Data .....	63
1. <i>Editing</i> .....	63
2. <i>Coding</i> (Pengkodean) .....	63
3. Tabulasi .....	64
4. Pemberian Skor atau Nilai .....	64
E. Teknik Analisa Data .....	65
F. Lokasi dan Jadwal Penelitian .....	66

## **BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**

A. Gambaran Umum FTIK IAIN Pontianak .....	69
1. Sejarah Singkat FTIK IAIN Pontianak .....	69
2. Visi dan Misi FTIK IAIN Pontianak .....	72
3. Struktur Organisasi FTIK IAIN Pontianak .....	72
4. Keadaan Dosen, Karyawan, dan Mahasiswa FTIK IAIN Pontianak .....	75
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	74
1. Data Tentang Bagaimana konteks Implementasi Standar Penilaian Akre-ditasi Program Studi Sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Pada Fakultas Tarbiyah, dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Pontianak .....	75
2. Temuan Khusus Penelitian .....	97

## **BAB V Penutup**

A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	101

<b>Daftar Pustaka</b> .....	103
-----------------------------	-----



## **Daftar Gambar dan Bagan**

	<b>Halaman</b>
Gambar 2. 1: Manajemen Kendali Mutu di Perguruan Tinggi (lihat Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Ditjen. Dikti, 2003) .....	26

# Daftar Tabel



	<b>Halaman</b>
Standar Mutu Kehadiran Dosen : 16 Kali Tatap Muka Persemester .....	23
Skala Kategori Implementasi Standar Penilaian Akreditasi Program Studi Sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) FTIK IAIN Pontianak .....	67
Jadwal Kegiatan Penelitian .....	67
Jumlah Dosen, dan Karyawan FTIK IAIN Pontianak .....	73
Rekapitulasi Jumlah Mahasiswa FTIK IAIN Pontianak Tahun Akademik 2015/2016 Semester Ganjil .....	74
Distribusi Responden Berdasarkan Aktivitas Pekerjaan .....	75
Distribusi Responden Terhadap Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strartegi Pencapaian FTIK IAIN Pontianak .....	77
Distribusi Responden Terhadap Tata Pamong, Kepemimpinan Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu .....	78
Distribusi Responden Terhadap Mahasiswa, dan Lulusan .....	79
Distribusi Responden Terhadap Sumber Daya Manusia .....	
Distribusi Responden Terhadap Pembelajaran, dan Suasana Akademik .....	80
Distribusi Responden Terhadap Sarana, dan Prasarana Informasi .....	81
Distribusi Responden Terhadap Penelitian, Pelayanan/ Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama .....	82

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring dengan perubahan zaman, sistem yang berlaku di lembaga pendidikan dituntut untuk terus menerus dilakukan perbaikan agar tidak terlindas oleh proses perubahan yang semakin cepat. Era *postmodern* dan globalisasi seperti sekarang ini menuntut terjadinya perubahan secara *divergen* bukan *convergen* seperti pada era modern. Dengan kata lain, segala bentuk perubahan positif ke semua arah, dan menghadirkan dunia yang semakin majemuk sangat diperlukan, dibandingkan dengan konsep pemikiran konservatif dunia yang diseragamkan. Oleh karena itu, jika lembaga pendidikan ingin tetap maju maka seharusnya lembaga tersebut dapat beradaptasi dengan heterogenitas nilai, pengetahuan, kebudayaan dan corak sosial, serta politik dalam masyarakat.

Mencermati *trend* perubahan tersebut lembaga Pendidikan Tinggi diharapkan dapat menjawab tuntutan perubahan dengan arif dan bijaksana. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah,

dan penyelenggaraan pendidikan di Perguruan Tinggi sedang gencar-gencarnya dilakukan. Salah satu diantara upaya tersebut adalah dengan menetapkan standar nasional pendidikan tinggi yang dikenal dengan istilah Standar Penilaian Akreditasi Program Studi Sarjana Badan.

Standar penilaian normatif ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 yang merupakan standar minimal penyelenggaraan pendidikan di Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia. Adapun secara spesifik tujuan standar akreditasi ini berdasarkan Pemendikbud tersebut tercermin pada pasal 3 yaitu antara lain :

*Pertama*, menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora, serta pembudayaan bangsa indonesia yang berkelanjutan.

*Kedua*, Menjamin agar pembelajaran pada Program Studi, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum NKRI mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam standar nasional pendidikan tinggi.

*Ketiga*, mendorong agar Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum NKRI mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang telah ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan berkelanjutan.

Jadi, dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tujuan pendidikan telah ditetapkan dengan standar nasional pendidikan tinggi untuk menggaransi penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh sebuah Perguruan Tinggi benar-benar dapat mencapai tujuan pendidikan nasional.

Selanjutnya, standar ini juga telah diimplementasikan pada setiap Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) di Indonesia seperti UIN, IAIN, dan STAIN. Implementasi hal ini, minimal disesuaikan dengan standar penilaian akreditasi program studi sarjana yang sudah di *breakdown* menjadi Standar Penyelenggaraan PT secara kontekstual yang sesuai dengan situasi, dan kondisi masing-masing daerah.

Dalam konteks penyelenggaran di IAIN Pontianak, upaya dari Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan (PPMP) kini menjadi berganti nama menjadi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dengan menyusun SPMI yaitu Standar Peningkatan Mutu Internal. SPMI dikembangkan oleh IAIN Pontianak berfokus pada standar pendidikan dan pengajaran tidak kepada standar mutu penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

SPMI ini diharapkan menjadi standar minimal untuk IAIN Pontianak dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan. Ujung tombak dari penyelenggaraan SPMI idealnya adalah fakultas-fakultas di lingkungan IAIN. Karena, hal ini terkait dengan pencapaian standar tersebut.

Dari hal tersebut, tim penulis kemudian melakukan penelitian dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar penilaian akreditasi program studi sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) di lingkungan FTIK IAIN Pontianak terutama dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran. Karena, untuk kedua bidang lainnya (Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat) IAIN belum membuat SPMI-nya. Selain itu, dalam Standar Penilaian Akreditasi Program Studi Sarjana yang diselenggarakan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ada 8 ruang lingkup standar tersebut yaitu; Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, standar dosen, dan

tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada kedelapan standar tersebut dalam implementasinya FTIK IAIN Pontianak.

Hal ini merupakan penelitian evaluasi kebijakan sejauh mana kebijakan yang dibuat dapat diimplementasi di lapangan. Diharapkan, melalui penelitian ini akan terpetakan penerapan standar di lingkungan FTIK. Kemudian, jika belum terlaksana akan dicarikan jalan keluar untuk mengatasinya.

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan pengambilan kebijakan pimpinan FTIK dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di lembaga ini terutama 8 standar minimal penyelenggaraan pembelajaran di FTIK. Sebagai kerangka acuan penelitian ini adalah Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 dan SPMI IAIN Pontianak.

## **B. Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Standar Pendidikan dan Pembelajaran di Lingkungan FTIK IAIN Pontianak?
2. Bagaimana upaya pimpinan FTIK dalam rangka mewujudkan pelaksanaan standar pendidikan dan pembelajaran di lingkungan FTIK IAIN Pontianak?
3. Bagaimana kesiapan tenaga administrasi FTIK dalam rangka mendukung implementasi standar pendidikan dan pembelajaran di lingkungan FTIK IAIN Pontianak?
4. Apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi oleh pihak-pihak FTIK dalam rangka implementasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi di lingkungan FTIK?

### **C. Tujuan**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan informasi secara mendalam tentang pelaksanaan standar pendidikan dan pembelajaran pada FTIK IAIN Pontianak.
2. Untuk mendapatkan informasi secara mendalam tentang peran yang dilakukan oleh Pimpinan FTIK dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Standar pendidikan dan pembelajaran pada FTIK IAIN Pontianak.
3. Untuk mendapatkan informasi secara mendalam tentang kesiapan para tenaga administrasi di FTIK dalam mendorong terwujudnya pencapaian Standar Pendidikan dan pembelajaran.
4. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi standar penilaian akreditasi program studi sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) di lingkungan FTIK IAIN Pontianak.

### **D. Manfaat**

Manfaat dari hasil:

1. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi FTIK IAIN Pontianak di mana untuk mengevaluasi pelaksanaan program, dan sebagai bahan kajian untuk menyusun kebijakan pengembangan lembaga ke depan.
2. Penelitian ini juga bermanfaat sebagai bahan kajian akademik tentang implementasi standar nasional pendidikan tinggi dalam konteks lokal.
3. Bagi IAIN Pontianak, penelitian ini menjadi bahan evaluasi, dan proyeksi untuk pengembangan fakultas-fakultas di lingkungan IAIN Pontianak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan PTKN.



# **BAB II**

## **KAJIAN TEORI**

### **A. Implementasi Kebijakan Pendidikan** **a) Pengertian Implementasi**

Pengertian implementasi berdasarkan definisi dari para ahli terdapat berbagai macam. Menurut Guntur Setiawan (2004:39) bahwa implementasi adalah suatu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan, dan tindakan untuk tercapai suatu tujuan tersebut, serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Selanjutnya, Hanifah Harsono (2002:67) menyatakan bahwa implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke administrasi. Sehingga, suatu implementasi merupakan suatu bentuk pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Sedangkan, Menurut Nurdin Usman (2002:70), menyatakan bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindak atau adanya mekanisme suatu sistem. Sehingga, implementasi bukan

sekedar aktivitas melainkan suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Mazmanian dan Sabatier (Riant, 2006:119) mengemukakan bahwa implementasi adalah serangkaian upaya untuk melaksanakan keputusan kebijakan. Menurutnya:

-----  
| " I m p l e m e n t a t i o n   i s   t h e   c a |  
| u s u a l l y   i n c o r p o r a t e d   i n   a   s t a t u t e   b u t   w h i c h   c a n   a l s o   t a k e   t h e   |  
| f o r m   o f   i m p o r t a n t   e x e c u t i v e s   o r d e r s   o f   o r   c o u r t   d e c i s s i o n .   |  
| I d e a l l y ,   t h a t   d e c i s s i o n   i n d e t i f i e s   t h e   p r o b l e m ( s )   t o   b e   a d d r e s s e d ,   |  
| s t i p u l a t e s   t h e   o b j e c t i v e ( s )   t o   b e   p u r s u e d ,   a n d ,   i n   a   v a i e t y   o f   |  
w a y s ,   " s t r u c t u r e s "   t h e   i m p

Menurut Kusrini dan Andri Koniyo (2007:279) implementasi merupakan kegiatan akhir dari proses penerapan sistem baru di mana sistem yang baru ini dioperasikan secara menyeluruh. Dalam hal ini sistem yang baru harus dilakukan melalui proses analisis, dan desain secara terinci.

Proses implementasi ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu:

- 1) Penerapan dan proses implementasi,
- 2) Pelaksanaan proses implementasi, dan
- 3) tindak lanjut proses implementasi.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas implementasi diartikan sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang, dan terperinci. Dalam hal ini implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap sempurna dengan resiko kesalahan diminimalisasi sedemikian rupa.

## b) Kebijakan Pendidikan

Kebijakan dalam Kamus Bahasa Indonesia (2008:199) diartikan sebagai; 1) Kepandaian; kemahiran, 2) Pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip sebagai pedoman untuk mencapai sasaran; garis haluan. Sedangkan menurut Achmad S. Ruky (2006:25) istilah kebijakan adalah sengaja digunakan untuk mengindonesiakan *policy* l a i h s t " i l a h t e r s e b u t t i d a l a m Indonesia.

Sementara itu, istilah politik Miriam Budiardjo (2008: 20) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan adalah pihak yang mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

Kebijakan (*policy*) seringkali di campuradukkan dengan kebijaksanaan (*wisdom*), dan aturan hukum (*law*). Namun, landasan utama yang mendasari suatu kebijakan tidak semata hanyalah pertimbangan akal. Di samping itu, akal manusia merupakan unsur yang dominan di dalam mengambil keputusan dari berbagai pilihan dalam pengambilan keputusan kebijakan.

Selain itu, Makinuddin dan Tri Hardiyanto (2006:18), menyebutkan bahwa perbedaan mendasar antara kebijakan, dan hukum adalah sifat hukum yaitu keadilan dan kemanfaatan yang tidak ada pada kebijakan, perbedaan ini yang membedakan suatu kebijakan dengan studi hukum. Istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan yang dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan.

Mustopadidjaja (dalam Hanif Nurchlis, 2007: 263-264) menjelaskan bahwa : Kebijakan adalah keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu sebagai keputusan di mana untuk mencapai tujuan tersebut yang berisikan ketentuan-ketentuan dapat dijadikan pedoman perilaku dalam;

- a) Pengambilan keputusan lebih lanjut dilakukan baik kelompok sasaran atau pun (unit) organisasi pelaksana kebijakan.
- b) Penerapan dan pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan serangkaian proses dari suatu perencanaan dan perumusan oleh suatu kelompok atau lembaga / instansi pemerintah berupa peraturan atau program untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Peraturan atau program merupakan perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan agar tujuan yang bersifat melembaga dapat tercapai.

Sedangkan, kebijakan pendidikan atau *educational policy*, menurut Ali Imron (1995:21) adalah suatu pertimbangan didasarkan atas sistem nilai, dan beberapa penilaian atas faktor-faktor bersifat situasional. Di samping itu, pertimbangan merupakan perencanaan yang dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga.

Di dalam masyarakat modern proses pendidikan tidak dapat dilakukan secara terbatas oleh keluarga maupun masyarakat. Pendidikan semestinya menjadi tugas bersama di dalam masyarakat. Sehingga, muncullah lembaga pendidikan yang berpusat pada pelatihan yang proses pendidikan dapat berjalan secara formal.

Di dalam melaksanakan tugas pendidikan diperlukan pengaturan tertentu sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan oleh *stakeholder* lembaga pendidikan dapat tercapai (H.A.R. Tilaar, 2008: 16-18).

Kebijakan pendidikan terkait dengan peraturan kehidupan dengan sesama manusia. Hal ini menunjukkan aspek sosialitas dari keberadaan manusia. Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan tidak terlepas dari hakikat manusia. Selanjutnya hakikat manusia akan membawa pada tujuan hidup manusia, dan dapat mewujudkan tujuan tersebut.

Di sini peneliti, muncul pertanyaan mengenai apakah sebenarnya proses pendidikan? Pengertian hakikat proses pendidikan melahirkan berbagai kebijakan pendidikan. Salah satu makna dari proses pendidikan ialah pendidikan sebagai salah satu proses pemberdayaan. (H.A.R. Tilaar, 2008:18-19). Pemberdayaan diartikan sebagai usaha meningkatkan peran, dan fungsi suatu sumber daya (Sumber Daya Alam (SDA), dan Sumber Daya Manusia (SDM)) menuju pemanfaatan yang tidak sia-sia (*mubadzir* secara duniawi dan *ukhrowi*). Sehingga pemberdayaan merupakan kegiatan terpadu antara berbagai unsur satuan organisasi, serta berbagai aspek kegiatan kehidupan dunia dan akhirat ([Http://global-i.weebly.com/pemberdayaan.html](http://global-i.weebly.com/pemberdayaan.html)).

### **c) Implementasi dalam Kebijakan Pendidikan**

Pada prinsipnya, Implementasi kebijakan adalah cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan tidak berlebih maupun tidak kurang.

Menurut Riant Nugroho D. (2006:119), implementasi kebijakan adalah suatu hal yang paling berat, masalah yang tidak dijumpai dalam konsep pendidikan. Selain itu, ancaman utama

dari suatu implementasi adalah konsistensi implementasi sendiri, tidak menambah, dan tidak mengurangi melainkan tepat sasaran.

Dalam studi implementasi suatu kebijakan menurut Robert J. Starratt (1995:136) menyatakan bahwa :

" Kebijakan yang direka harus dilaksanakan dan dihidupkan dalam mencapai tujuan dari kebijakan tersebut. Dengan berbagai alasan, orang yang ingin mempertahankan status quo mengumpulkan keputusan-keputusan di atas. Sebaliknya, kebijakan-kebijakan yang berhasil sampai pada implementasi dan berdampak pada sesuatu pada tujuan tersebut adalah kebijakan sejak awal melibatkan para partisipan dalam diskusi mengenai maksud kebijakan, integrasi kebijakan tersebut dalam pelaksanaan, dan prosedur pelaksanaannya

Berdasarkan pendapat tersebut suatu kebijakan yang diimplementasikan harus disusun dengan perencanaan yang matang, dan melibatkan semua pihak. Selain itu, suatu kebijakan harus disegerakan untuk diimplementasikan. Sehingga, dapat diketahui tingkat keberhasilannya untuk orang banyak.

Jika hal ini tidak dilakukan maka kebijakan menjadi rencana bagus yang akan tersusun rapi dalam tumpukan arsip lainnya. Dengan demikian " *to implement provide the means for carrying out* " , mengimplementasikan melengkapi atau menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Arif Rohman, 2009:134) implementasi kebijakan merupakan sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/ pejabat-pejabat/ kelompok-kelompok pemerintah/swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan kebijakan telah ditentukan terlebih dahulu. Dengan ini tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk menstransformasikan keputusan ke dalam istilah operasional maupun usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan.

Van Meter dan Van Horn mengawali gagasan teori tentang implementasi dengan menyampaikan enam variabel diantaranya meliputi:

- 1) Standar dan tujuan kebijakan;
- 2) Sumber daya;
- 3) Komunikasi;
- 4) Interorganisasi dan aktivitas penguatan;
- 5) Karakteristik agen pelaksana;
- 6) Kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta karakter pelaksana.

*(Arif Rohman, 2009:137)*

Menurut M. Grindle (Arif Rohman, 2009:134) bahwa proses implementasi mencakup tugas untuk membentuk suatu ikatan yang memungkinkan arah suatu kebijakan dapat direalisasikan sebagai hasil dari aktivitas pemerintah. Seorang ahli yang bernama Charles O. Jones (Arif Rohman, 2009:135) mendasarkan diri pada konsepsi aktivitas-aktivitas fungsional. Menurutnya, implementasi adalah suatu aktivitas untuk mengoperasikan sebuah program.

Ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu sebagai berikut :

- a. Pengorganisasian, pembentukan/penataan kembali sumber daya, unit-unit, serta metode untuk menjalankan program agar bisa berjalan dengan lancar.
- b. Interpretasi, yaitu aktivitas menafsirkan agar program menjadi terencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima, serta dapat dilaksanakan.
- c. Aplikasi, yaitu berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran atau hal lainnya yang disesuaikan dengan tujuan/perengkapan program.

Terkait dengan implementasi kebijakan pemerintah yang berstatus sebagai pemimpin (*ullil amri*). Dalam hal ini umat Islam sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran memiliki kewajiban untuk mematuhi selama perintah, dan tugas yang diberikan tersebut tidak melanggar hukum telah diwajibkan oleh pemimpin yang lebih tinggi yaitu Allah Swt. dan Rasul-Nya.

Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran sebagai berikut :

A r t i n y a : -orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (Muhammad), dan *ullil amri* (pemimpin di antara kalian) k a-N i i s a n a " (( QS: 59)

Lebih lanjut Rasulullah Saw juga mengingatkan kepada kaum Muslim akan adanya pemimpin yang zalim. Bahkan, ketika pemimpin adalah dari kalangan umat Islam, dan tidak ada siapa

pun yang mampu menghalangi hendaklah tetap mentaatinya.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits Rasulullah Saw (dalam, Fahrur Muis, 2011:29) sebagai berikut :

«  
...»  
»  
«  
Artinya: "Nanti setelah aku akan ada seorang pemimpin yang tidak mendapat petunjukku (dalam ilmu, pen) dan tidak pula melaksanakan sunnahku (dalam amal, pen). Nanti akan ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang hatinya adalah hati setan, namun jasadnya ada"  
"Wahai Rasulullah, apa ya menemui zaman seperti itu?"

Beliau bersabda kepada pemimpin-pemimpinmu, walaupun mereka menyiksa punggungmu dan mengambil hartamu. Tetaplah mendengar dan taat kepada mereka. " (HR. Muslim no. 1847)

Dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu cara untuk melaksanakan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga dalam mengimplementasikan suatu kebijakan perlu diperhatikan tentang keterlibatan dalam implementasi kebijakan, esensi proses administratif, ketaatan pada aturan main, dan pengaruh implementasi kebijakan suatu program.

#### **d) Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan**

Suatu implementasi kebijakan menghasilkan keberhasilan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan, dan kelompok sasaran kebijakan tersebut. Arif Rohman (2009: 147) menyatakan, bahwa ada tiga faktor yang dapat menentukan kegagalan, dan keberhasilan dalam implementasi kebijakan yaitu:

- a. Faktor yang terletak pada rumusan kebijakan dibuat oleh para pengambilan keputusan, terkait kalimat yang jelas atau tidak, sasarannya tepat atau tidak, mudah dipahami atau tidak, mudah diinterpretasikan atau tidak, dan terlalu sulit dilaksanakan atau tidak.
- b. Faktor yang terletak pada personil pelaksana, yakni yang menyangkut tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan, serta kemampuan kerjasama dari para pelaku pelaksanaan kebijakan. Dalam personil pelaksanaan adalah latar belakang budaya, bahasa, serta ideologi kepartaian masing-masing. Hal itu dapat mempengaruhi cara kerja secara kolektif dalam menjalankan misi implementasi kebijakan tersebut.
- c. Faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksanaan, yakni menyangkut jaringan sistem, hierarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasi, aturan main organisasi, target masing-masing tahap yang ditetapkan, model *monitoring* biasa digunakan, serta evaluasi yang dipilih.

Sedangkan menurut Sabatier dan Mazmanian (Sudiyono, 2007:90-100) mengemukakan adanya berbagai kondisi yang mendukung agar implementasi dapat dilaksanakan secara optimal, yaitu sebagai berikut:

- a. Program harus mendasarkan diri pada sebuah kajian teori terkait dengan perubahan pelaku kelompok sasaran untuk

mencapai hasil telah ditetapkan. Kebanyakan pengambilan atau perumusan kebijakan didasarkan pada teori sebab-akibat. Teori ini terdiri dua bagian, bagian pertama adanya keterkaitan antara pencapaian dengan tolak ukur atau hasil yang diharapkan. Bagian kedua khusus mengenai cara pelaksanaan kebijakan yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran.

- b. Undang-undang atau peraturan tidak boleh bermakna ganda. Dalam hal ini pemerintah dapat mengkaji ulang produk hukum. Sasaran kebijakan harus memiliki derajat ketepatan dan kejelasan di mana keduanya berlaku secara internal maupun dalam keseluruhan program yang dilak-sanakan oleh pihak pelaksana.
- c. Para pelaku kebijakan harus memiliki kemampuan manajerial dan politis, serta komitmen terhadap tujuan yang akan dicapai. Para pemimpin dan perumusan kebijakan dapat mengambil langkah baik pada ranah perencanaan sebuah peraturan maupun dalam pengangkatan personil baru non layanan masyarakat. Hal ini guna meningkatkan isi dan keterdukungan pemimpin terhadap pencapaian tujuan undang-undang tersebut.
- d. Program harus didukung oleh para pemangku kepentingan (pemilih, perumusan undang-undang, dan pengadilan yang mendukung).
- e. Prioritas umum dari sasaran perundang-undangan tidak *signifikan* direduksi oleh waktu dengan adanya kebijakan yang sangat darurat pada publik atau perubahan keadaan sosial ekonomi sesuai, dan didasarkan pada teori perundang-undangan secara teknis ataupun memperoleh dukungan publik.

## **B. Pengertian Standar Penilaian Akreditasi Program Studi Sarjana**

Berbicara tentang standar penilaian akreditasi program studi sarjana dalam hal ini tidak terlepas dari kehadiran Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). BAN-PT dapat melakukan kegiatannya tidak lepas dari ketentuan perundang-undangan yang menjaga kebijakan tersebut. Penetapan Standar Nasional Pendidikan merupakan amanah dari UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Pada mulanya, BAN-PT didirikan tahun 1994 untuk menyelenggarakan akreditasi untuk program studi sarjana (S1). Seiring perkembangan zaman, dan kebutuhan terhadap akreditasi perguruan tinggi di berbagai wilayah di Indonesia. Pada tahun 1999 BAN-PT menyelenggarakan akreditasi untuk program magister (S2), dan pada tahun 2001 dengan program doktor (S3). Kemudian pada tahun 2007 diselenggarakan akreditasi untuk Institusi Perguruan Tinggi.

Sejak dibentuk pada tahun 1994 sampai akhir tahun 2008, BAN-PT berhasil melakukan akreditasi terhadap 9288 program studi dari perguruan tinggi negeri, swasta, keagamaan, dan kedinasan meliputi program diploma (1503 program studi), sarjana (6977 program studi), magister (749 program studi), dan doktor (59 program studi). Dalam dua tahun terakhir ini telah dilakukan akreditasi terhadap 80 institusi perguruan tinggi negeri dan swasta.

Mengingat Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, PP RI Nomor 19 tahun 2005, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta kecenderungan perkembangan kebijakan tentang pendidikan tinggi menekankan pada mutu dan akuntabilitas publik institusi perguruan tinggi, serta program studi. Oleh karena itu, diperlukan akreditasi program studi sarjana. Instrumen akreditasi tahun 2008 ini

disusun dengan mempertimbangkan perkembangan aspek legal peraturan perundang-undangan, dan tuntutan praktik proses akreditasi terbaik yang berlaku secara internasional (*international best practices*).

Standar akreditasi adalah tolak ukur yang harus dipenuhi oleh program studi sarjana. Standar akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) dapat digunakan sebagai dasar; (1) Penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan, dan perangkat kependidikan program studi sarjana dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) Evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan, dan perangkat kependidikan program studi sarjana; (3) Penetapan kelayakan program studi sarjana untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) Perumusan rekomendasi perbaikan, dan pembinaan mutu program studi sarjana.

Standar akreditasi program studi sarjana mencakup standar tentang komitmen program studi sarjana terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*), dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*) dapat dikemas dalam standar akreditasi.

Untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu program akreditasi program studi yang dilaksanakan oleh BAN-PT. Akreditasi program studi sarjana adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu, dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim *asesor* yang terdiri atas pakar memahami penyelenggaraan program akademik program studi.

Keputusan mengenai mutu pendidikan yang didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap bukti terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar, serta pertimbangan para pakar sejawat. Bukti yang dibutuhkan termasuk laporan tertulis disiapkan oleh program studi yang utim *asesor* ke lokasi program studi.

Selanjutnya, dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yaitu *asesor*, program studi sarjana yang diakreditasi, dan BAN-PT sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) Standar akreditasi program studi sarjana yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan, dan perangkat kependidikan program studi sarjana; (2) Prosedur akreditasi program studi sarjana yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi sarjana; (3) Instrumen akreditasi program studi sarjana yang digunakan untuk menyajikan data, dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi sarjana disusun berdasarkan standar akreditasi yang ditetapkan; dan (4) Kode etik akreditasi program studi sarjana yang merupakan "aturan main" untuk proses, serta hasil akreditasi program studi sarjana.

Adapun tujuan dari standar akreditasi ada 3 yaitu sebagai berikut:

- a. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan, dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora, serta kebudayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan.
- b. Menjamin agar pembelajaran pada Program Studi, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum NKRI untuk mencapai

mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan tinggi.

- c. Mendorong agar Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum NKRI mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

## **1. Implementasi Standar Mutu Perguruan Tinggi**

Implementasi merupakan penerapan dari standar mutu perguruan tinggi yang mengaju kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada tingkat satuan Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai kerangka acuan standar mutu pada masing-masing Perguruan Tinggi. Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam implementasi standar mutu perguruan tinggi, yaitu :

- a. **Langkah Pertama:** Penetapan kelembagaan implementasi standar mutu perguruan tinggi.

Untuk mengimplementasikan standar mutu perguruan tinggi ditetapkan dalam suatu peraturan dibutuhkan suatu kelembagaan di dalam perguruan tinggi dalam melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu tersebut secara berkelanjutan.

Paling tidak terdapat tiga alternatif model kelembagaan dalam implementasi standar mutu perguruan tinggi, yaitu:

- 1) Membentuk unit/lembaga/kantor/biro yang bertugas melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu perguruan tinggi;
- 2) Implementasi standar mutu perguruan tinggi diintegrasikan ke dalam kelembagaan perguruan tinggi. Sehingga tidak perlu dibentuk kelembagaan khusus yang menangani implementasi standar mutu perguruan tinggi;

- 3) Pada tahap awal dibentuk unit/lembaga/kantor/biro yang bertugas melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu perguruan tinggi. Sampai batas waktu yang ditetapkan, secara berangsur pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan standar mutu diintegrasikan ke dalam kelembagaan perguruan tinggi.

Masing-masing alternatif model kelembagaan sebagaimana dikemukakan di atas memiliki kelebihan, dan kekurangan. Oleh karena itu setiap perguruan tinggi dapat menjalankan penjaminan mutu dengan jalan mengelola standar mutu perguruan tinggi harus mempertimbangkan secara saksama kemampuan, budaya organisasi, ukuran, serta sejarah yang dimiliki oleh perguruan tinggi tersebut.

Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa untuk sebuah perguruan tinggi yang relatif baru berdiri, jumlah program studi, serta mahasiswa yang dikelola relatif kecil, kemampuan pendanaan terbatas, dan belum memiliki budaya organisasi. Oleh karena itu, sebaiknya memilih alternatif lain, yaitu implementasi standar mutu perguruan tinggi diintegrasikan ke dalam kelembagaan perguruan tinggi.

Alternatif model kelembagaan manapun yang dipilih, kelembagaan tersebut memiliki fungsi dan tugas antara lain sebagai berikut:

- 1) Menjaga seluruh proses pengelolaan standar;
- 2) Memantau pengaruh proses pada mutu kegiatan suatu unit;
- 3) Mengkoordinasi rapat manajemen untuk membahas implementasi standar mutu di unit;
- 4) Melaporkan setiap kemajuan, dan hambatan dalam implementasi standar mutu;
- 5) Menemukan penyimpangan, dan melakukan tindakan koreksi;

6) Melakukan pengembangan standar mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan.

**b. Langkah Kedua:** Penyusunan manual implementasi standar mutu perguruan tinggi.

Agar implementasi standar mutu perguruan tinggi dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yaitu penjaminan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan penetapan manual/petunjuk pelaksanaan mengenai prosedur/tata cara implementasi standar mutu perguruan tinggi untuk setiap standar mutu perguruan tinggi. Manual implementasi ini diperlukan untuk mencegah multi tafsir dari para pelaksana standar di lapangan tentang implementasi suatu standar mutu perguruan tinggi dilaksanakan.

Tim/ satuan tugas yang dibentuk oleh perguruan tinggi dapat merancang manual implementasi standar mutu perguruan tinggi. Dalam hal ini dapat dikemukakan sebuah contoh tentang Manual Implementasi Standar Mutu Kehadiran Dosen Dalam Tatap Muka.

**Tabel 2.1**  
**Standar Mutu Kehadiran Dosen : 16 Kali**  
**Tatap Muka Persemester**

No	Urutan Kegiatan	Petugas
1.	Meminta jadwal kuliah setiap dosen	Tata Usaha Fakultas
2.	Menyusun jadwal kuliah lengkap per semester	Tata Usaha Fakultas
3.	Mengumumkan jadwal kuliah kepada mahasiswa	Tata Usaha Fakultas
4.	Menyediakan berita acara kuliah setiap dosen yang berisi tanggal, pokok bahasan, tanda tangan dosen	Biro Administrasi Akademik
5.	Mengisi berita acara kuliah	Dosen
6.	Menyusun rekapitulasi kehadiran dosen	Tata Usaha Fakultas

	untuk memberi kuliah	
7.	Melaporkan rekapitulasi kehadiran dosen untuk memberi kuliah kepada pemimpin fakultas	Tata Usaha Fakultas
8.	Memberikan umpan balik kepada dosen tentang tingkat kehadirannya dalam memberi kuliah	Pemimpin Fakultas

**c. Langkah Ketiga:** Penyusunan dokumen implementasi standar mutu perguruan tinggi.

Dokumen implementasi standar mutu perguruan tinggi selain berfungsi sebagai petunjuk tentang prosedur implementasi suatu standar mutu juga sebagai alat untuk memantau tingkat keberhasilan implementasi suatu standar mutu tertentu.

Tim atau satuan tugas penjaminan mutu terdapat unsur pelaksana, menginisiasi penyusunan dokumen ini dengan melakukan sosialisasi, dan uji coba terlebih dahulu. Sebelum dokumen ditetapkan sebagai dokumen resmi implementasi suatu standar mutu tertentu dengan dibubuhi kode dokumen. Keterlibatan unsur pelaksana dalam tim atau satuan tugas dalam penyusunan dokumen ini sangat diperlukan agar dokumen sesuai dengan kebutuhan lapangan dan dapat mendukung pencapaian serta pemantauan pemenuhan suatu standar tertentu. *upstream management* .

**d. Langkah Keempat:** Sosialisasi *draft* standar mutu, kelembagaan, manual, dan dokumen pada *internal stakeholders*.

Setelah *draft* standar mutu, kelembagaan, manual, dan dokumen selesai dirumuskan oleh tim, sebelum ditetapkan dalam suatu peraturan oleh pemimpin perguruan tinggi. Sebaiknya dilakukan sosialisasi kepada seluruh *internal stakeholders* (dosen, non dosen, serta mahasiswa) sesuai dengan relevansi.

Kegiatan sosialisasi dapat dilakukan dengan presentasi, dan diskusi *draft* standar mutu, kelembagaan, manual, dan dokumen yang telah selesai dirumuskan oleh tim. Melalui kegiatan ini akan diperoleh masukan dari berbagai pihak yang dapat dipergunakan sebagai dasar penyempurnaan dokumen tersebut.

Setelah standar mutu, kelembagaan, manual dan dokumen selesai dirumuskan, serta telah ditetapkan dalam suatu peraturan oleh pemimpin perguruan tinggi maka sebelum implementasi secara menyeluruh hal-hal tersebut perlu didiseminasikan secara saksama.

Dalam kegiatan ini, selain dipresentasikan penjaminan mutu secara konseptual harus diperagakan tentang proses implementasi standar mutu perguruan tinggi *in action*. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan memilih satu atau lebih unit sebagai model uji coba. Melalui diseminasi ini diharapkan baik penanggungjawab, pelaksana, dan sasaran penerapan standar mutu perguruan tinggi, memiliki pemahaman, dan komitmen untuk mengimplementasikan standar mutu yang telah ditetapkan.

**e. Langkah Kelima:** Implementasi standar mutu, kelembagaan, manual, serta dokumen.

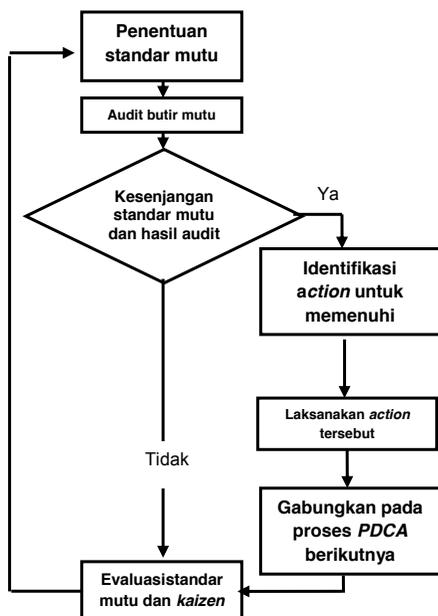
Implementasi standar mutu oleh penanggungjawab, pelaksana, serta sasaran penerapan standar mutu dalam suatu sub komponen perguruan tinggi dimulai dengan melihat rumusan standar dari setiap kegiatan yang dilaksanakan. Mengacu pada standar penanggungjawab, pelaksana, serta sasaran penerapan standar mutu membaca manual implementasi standar mutu setiap kegiatan dalam suatu sub komponen. Setelah itu siapkan dokumen yang relevan dengan setiap langkah dalam kegiatan tersebut.

Sebagaimana dikemukakan di atas, dokumen ini berfungsi sebagai penuntun kegiatan agar sesuai dengan manual. Selain itu,

juga berfungsi sebagai sarana pengendalian agar pelaksanaan kegiatan selalu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pada gilirannya, hasil pengendalian digunakan untuk mengembangkan/menaikkan standar ke arah yang lebih baik.

## 2. Evaluasi Implementasi Standar Mutu atau Manajemen Kendali Mutu di Perguruan Tinggi.

Sebagai upaya untuk melihat hasil dari implementasi dari standar mutu atau manajemen kendali mutu di perguruan tinggi, maka perlu dilakukan evaluasi secara bertahap. Berikut ini alur tahapan evaluasi manajemen kendali mutu di perguruan tinggi :



**Gambar 1: Manajemen Kendali Mutu di Perguruan Tinggi (lihat Buku Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Ditjen. Dikti, 2003)**

### **C. Standar Pendidikan dan Pembelajaran di Lingkungan FTIK IAIN Pontianak**

Standar pendidikan dan pembelajaran di lingkungan FTIK IAIN Pontianak dalam penelitian ini mengacu pada standar, dan elemen penilaian akreditasi program studi sarjana. Hal ini karena standar, dan elemen penilaian mengacu pada standar dokumen akreditasi berupa evaluasi diri dan borang program studi, serta borang yang di isi oleh Fakultas/Sekolah Tinggi. Adapun standar tersebut terdapat dalam buku V Pedoman Penilaian Akreditasi Program Studi Sarjana, yaitu:

1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaiannya.
2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu.
3. Mahasiswa, dan lulusan.
4. Sumber Daya Manusia
5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik.
6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi.
7. Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama.

Adapun deskripsi standar 7 poin di atas dirinci menjadi elemen penilaian/parameter dalam buku V Pedoman Penilaian Akreditasi Program Studi Sarjana adalah sebagai berikut.

1. Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

Standar pertama dalam standar penilaian akreditasi program studi adalah berkaitan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi digunakan untuk mencapai tujuan. Dari penerapan poin menggambarkan keunggulan mutu penyelenggaraan, dan strategi program studi untuk mencapai tujuan organisasi. Lebih lanjut, strategi, dan upaya perwujudan. Hendaknya dapat dipahami dan didukung dengan penuh komitmen, serta partisipasi yang baik oleh seluruh pemangku kepentingannya mulai pada level *top manager* sampai *lower manager*.

Indra Bastian (2007: 3) menanyakan bahwa rumusan visi dan misi harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

### **Rumusan Visi**

- a) Mencerminkan apa yang ingin dicapai suatu organisasi.
- b) Memberikan arah, dan fokus strategi yang jelas.
- c) Memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran dapat berperan dalam mendefinisikan, dan membentuk masa depan organisasi.
- d) Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi.
- e) Mampu menjamin keseimbangan kepemimpinan organisasi.

### **Rumusan Misi**

- a) Melengkapi semua pesan yang terdapat dalam visi.
- b) Memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai.
- c) Memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani.
- d) Memperhitungkan berbagai masukan dari *stakeholder*.

Berdasarkan hal tersebut, seluruh rumusan yang menjadi standar pencapaian di atas hendaknya dapat dipahami, dijabarkan secara logis, sekuensi, dan langkah-langkah yang disusun di dalamnya mengikuti alur pikir (logika) secara akademik. Strategi dirumuskan didasari analisis kondisi yang komprehensif dengan menggunakan metode, dan instrumen yang shahih, dan andal. Sehingga, menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan, dan kinerja yang sistematis, saling berkontribusi, dan berkesinambungan.

Kesuksesan di salah satu sub-sistem akan berkontribusi, dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem selanjutnya. Berdasarkan hal tersebut, strategi, serta keberhasilan pelaksanaan akan diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah dipahami seluruh pemangku kepent-

ngan. Sehingga, visi yang diajukan benar-benar visi bukan mimpi, dan *h iplatisuda*"n) .( "

Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan pewujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik menjadi cerminan keterlaksanaan misi, dan strategi dengan baik.

Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan, dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas dari program studi dan perguruan tinggi yang bersangkutan.

a. Deskripsi

Program studi mempunyai visi yang dinyatakan secara jelas sejalan dengan visi institusi pengelolanya. Visi tersebut memberikan gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk mewujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi program studi dinyatakan secara spesifik mengenai perihal yang dilaksanakan. Program studi memiliki tujuan dan sasaran dengan rumusan yang jelas, spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan, relevan dengan visi, dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut di atas direfleksikan dalam bentuk *outcomes* program studi (lulusan, hasil penelitian, dan pelayanan masyarakat). Pernyataan tersebut diketahui, dipahami dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola program studi dan institusi, serta diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal di program studi. Standar ini menjadi acuan bagi seluruh kegiatan penyelenggaraan program studi tersebut.

b. Elemen Penilaian:

- 1) Visi yang baik adalah yang futuristik, menantang, memotivasi seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi, realistik terhadap: a. Kemampuan dan faktor-faktor internal

maupun eksternal; b. Asumsi; dan c. Kondisi lingkungan yang di definisikan dengan kaidah yang baik dan benar, konsisten dengan visi perguruan tinggi.

- 2) Misi program studi adalah tri dharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Keterlaksanaan misi yang diartikulasikan merupakan upaya mewujudkan visi program studi.
  - 3) Tujuan dan sasaran yang baik adalah yang realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dengan rentang waktu yang jelas dan relevan terhadap misi dan visi.
  - 4) Visi, misi, tujuan, dan sasaran yang baik harus menjadi milik, dipahami, dan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan program studi.
  - 5) Strategi pencapaian sasaran yang baik ditunjukkan dengan bukti tertulis dan fakta di lapangan.
2. Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu program studi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi sebagai kunci penting bagi keberhasilan program dalam menjalankan misi pokoknya: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tata pamong program studi harus mencerminkan pelaksanaan *good university governance* dan melaksanakan norma, struktur, peran, fungsi, dan aspirasi pemangku kepentingan program studi. Kepemimpinan program studi harus secara efektif memberi arah, motivasi, dan inspirasi untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan, dan sasaran melalui strategi yang dikembangkan.

Sistem pengelolaan harus secara efektif dan efisien melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, dan pengawasan. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan *continuous quality improvement* pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (*quality management system*) dalam rangka pemuasan pelanggan (*customer satisfaction*).

a. Deskripsi

Tata pamong (*governance*) merupakan sistem untuk memelihara efektifitas peran para konstituen dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan program studi. Tata pamong yang baik terlihat dari lima kriteria yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan *fairness*. Struktur tata pamong mencakup badan pengatur yang aktif dengan otonomi yang cukup untuk menjamin integritas lembaga, dan memenuhi pertanggungjawaban dalam pengembangan kebijakan, dan sumber daya yang konsisten dengan visi dan misi. Tata pamong didukung dengan penetapan dan penegakan sistem nilai dan norma, serta dukungan institusi, dosen, mahasiswa, karyawan dan *stakeholders*. Pelaksanaan dan penegakan nilai dan norma institusi, dosen, karyawan dan mahasiswa ini didukung dengan adanya mekanisme pemberian penghargaan, dan sanksi yang diberlakukan secara konsisten dan konsekuen.

Untuk membangun tata pamong yang baik (*good governance*), program studi memiliki kepemimpinan yang kuat (*strong leadership*) dapat mempengaruhi seluruh perilaku individu, dan kelompok dalam pencapaian tujuan. Kepemimpinan yang kuat adalah kepemimpinan yang visioner (yang mampu merumuskan, dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, menarik tentang masa depan).

Tata pamong mampu memberdayakan sistem pengelolaan yang berorientasi pada prinsip pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Tata pamong memungkinkan terbentuknya sistem administrasi berfungsi untuk memelihara efektifitas, efisiensi, dan produktifitas dalam upaya pewujudan visi, pelaksanaan misi dan pencapaian tujuan, serta memelihara integritas program studi.

Implementasi tata pamong yang baik dicerminkan baiknya sistem pengelolaan fungsional program studi dengan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terutama dalam penggunaan sumber daya pendidikan. Agar, tercapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dalam lingkup program studi.

Sistem pengelolaan yang dikembangkan dapat menjamin berkembangnya kebebasan akademis dan otonomi keilmuan pada program studi, serta mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan seluruh sumber daya yang diperlukan untuk meraih keunggulan mutu yang diharapkan. Untuk itu program studi memiliki perencanaan yang matang, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta personil yang sesuai, program pengembangan staf yang operasional dengan dilengkapi berbagai pedoman dan manual yang dapat mengarahkan dan mengatur program studi, serta sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi yang kuat, serta transparan.

Upaya penjaminan mutu meliputi adanya satuan organisasi yang bertanggung jawab, strategi, tujuan, standar mutu, prosedur, mekanisme, sumberdaya (manusia dan non-manusia), kegiatan, sistem informasi dan evaluasi yang dirumuskan secara baik,

dikomunikasikan secara meluas, dan dilaksanakan secara efektif untuk semua unsur program studi.

Penjaminan mutu terdiri dari penjaminan mutu internal dan eksternal. Penjaminan mutu internal menyangkut *input*, proses, *output*, dan *outcome* dalam sistem program studi antara lain melalui audit internal dan evaluasi diri. Sedangkan penjaminan mutu eksternal berkaitan dengan akuntabilitas program studi terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui audit, dan *asesmen* eksternal misalnya mekanisme sertifikasi, akreditasi, audit oleh pemerintah dan publik.

b. Elemen Penilaian:

- 1) Organ dan sistem tata pamong yang baik (*good university governance*) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan *fairness* penyelenggaraan program studi.
- 2) Sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam program studi.
- 3) Tata pamong didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan tegaknya aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, sistem penghargaan, sanksi dan pedoman, serta prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio) harus diformulasi, disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi, dipantau dengan peraturan dan prosedur yang jelas.
- 4) Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam program studi, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.

- 5) Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan dengan menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam perguruan tinggi.
- 6) Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi efektif (*planning, organizing, staffing, leading, controlling* dan operasi internal, serta eksternal).
- 7) Sistem penjaminan mutu dengan mekanisme kerja yang efektif, dan diterapkan dengan jelas pada tingkat program studi. Mekanisme penjaminan mutu harus menjamin adanya kesepakatan, pengawasan, dan peninjauan secara periodik setiap kegiatan dengan standar serta instrumen yang shahih dan andal.
- 8) Penjaminan mutu eksternal dilakukan berkaitan dengan akuntabilitas program studi (*input, proses, output, dan outcome*) terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui audit dan asesmen eksternal. Misalnya mekanisme sertifikasi, akreditasi, audit oleh pemerintah dan publik, dilengkapi dengan pedoman pelaksanaan dan laporan hasil audit dan *assesmen* eksternal.

### 3. Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan

Arief Budiman (2006:251-252), menyatakan bahwa : Mahasiswa adalah pemuda-pemuda berjiwa dinamis, terpelajar, karena ia mengetahui persoalan yang dihadapi secara cepat. Dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan di mana dasar negara sedang ada dalam bahaya, mahasiswa berhenti menjadi mahasiswa; Mereka adalah warga Indonesia yang harus menyelamatkan negaranya.

Berdasarkan pendapat di atas, mahasiswa pada akhirnya akan kembali pada masyarakat, dan berjuang untuk masyarakat. Sehingga, dari pandangan tersebut Perguruan Tinggi bertugas mempersiapkan mahasiswa agar siap untuk digunakan oleh masyarakat dan mencetak pribadi mahasiswa yang mampu membawa perubahan positif pada masyarakat.

Dari pandangan tersebut, maka buku V Pedoman Penilaian Akreditasi Program Studi Sarjana pada Standar 3 menempatkan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan sebagai salah satu standar acuannya. Dalam hal ini, sebuah program studi harus memberikan jaminan mutu, kelayakan kebijakan dan implementasi sistem rekrutmen, serta seleksi calon mahasiswa maupun pengelolaan lulusan sebagai satu kesatuan mutu yang terintegrasi. Program studi harus menempatkan mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan akademik untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi mencapai tujuan melalui strategi yang dikembangkan oleh program studi.

Program studi harus berpartisipasi secara aktif dalam sistem perekrutan dan seleksi calon mahasiswa agar mampu menghasilkan input mahasiswa dan lulusan bermutu. Program studi harus mengupayakan akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat, serta bakat. Program studi harus mengelola lulusan sebagai produk dan mitra perbaikan yang berkelanjutan program studi tersebut.

#### a. Deskripsi

Mahasiswa adalah pemangku kepentingan utama internal dan sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan akademik yang harus mendapatkan manfaat dari proses pendidikan, penelitian, dan layanan/pengabdian kepada masyarakat. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa mempertimbangkan kebijakan pada mutu *input*, pemerataan akses baik aspek wilayah maupun kemampuan

ekonomi. Selain itu, mekanisme rekrutmen yang akuntabel dan kesesuaian dengan karakteristik mutu, serta tujuan program studi.

Partisipasi aktif program studi dalam perekrutan dan seleksi calon mahasiswa adalah dengan melaksanakan dan mengusulkan persyaratan mutu *input* maupun daya tampung kepada institusi. Akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat, serta bakat yang diusahakan program studi berupa akses kepada fasilitas pusat kegiatan mahasiswa, asrama, layanan kesehatan, beasiswa, dan kegiatan ekstrakurikuler.

Dalam pengelolaan lulusan yang bermutu program studi menyiapkan pembekalan pengembangan *entrepreneurship*, pengembangan karir, magang, dan rekrutmen kerja. Kemitraan program studi dengan lulusan berupa *tracer study* dan penggalangan dukungan, serta *sponsorship* pada lulusan tersebut.

b. Elemen Penilaian:

- 1) Kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa (mencakup mutu prestasi dan reputasi akademik serta bakat pada jenjang pendidikan, *equitas* wilayah, kemampuan ekonomi, dan jender), pengelolaan lulusan dan alumni (mencakup layanan alumni, peran dalam asosiasi profesi atau bidang ilmu, dukungan timbal balik alumni).
- 2) Keefektifan implementasi sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa untuk menghasilkan calon mahasiswa bermutu dengan keterukuran dari jumlah peminat, proporsi pendaftar terhadap daya tampung dan proporsi yang diterima dan adanya registrasi.
- 3) Profil mahasiswa meliputi: prestasi dan reputasi akademik, bakat, serta minat.

- 4) Layanan dan kegiatan kemahasiswaan: ragam, jenis, wadah, mutu, harga, dan intensitas.
- 5) Profil lulusan: ketepatan waktu penyelesaian studi, proporsi mahasiswa yang menyelesaikan studi dalam batas masa studi tersebut.
- 6) Layanan dan pendayagunaan lulusan: ragam, jenis, wadah, mutu, harga, dan intensitas.
- 7) Pelacakan dan perekaman data lulusan: kekomprehensifan, pemutakhiran, profil pendidikan dengan masa kerja pertama, kesesuaian bidang dengan bidang studi, dan posisi kerja pertama.
- 8) Partisipasi lulusan dan alumni dalam mendukung pengembangan akademik, serta non-akademik program studi.

#### 4. Standar 4. Sumber Daya Manusia

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu sumber daya manusia mampu menjamin mutu penyelenggaraan program studi melalui program akademik sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Program studi harus mendayagunakan sumber daya manusia dapat meliputi dosen, dan tenaga kependidikan yang layak, kompeten, relevan, serta andal. Dosen merupakan sumber daya manusia utama dalam proses pembentukan nilai tambah bermu pada diri mahasiswa yang dibimbingnya, bidang ilmu yang diampunya, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin mutu dosen dan tenaga kependidikan bermutu baik maka program studi harus memiliki kewenangan dan pengambilan keputusan dalam seleksi, penempatan, pengembangan karir yang baik. Program studi harus memiliki sistem *monitoring* dan evaluasi yang efektif untuk menjamin mutu pengelolaan program akademik.

##### a. Deskripsi

Program studi mendayagunakan dosen tetap dengan memenuhi kualifikasi akademik dan profesional, serta kualitas kinerja dalam jumlah sejajar dengan tuntutan penyelenggaraan program. Jika diperlukan program studi mendayagunakan dosen tidak tetap (dosen mata

kuliah, dosen tamu, dosen luar biasa maupun pakar keilmuan) untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu program akademik.

Program studi mendayagunakan tenaga kependidikan seperti pustakawan, laboran, analisis, teknisi, operator, dan staf administrasi dengan kualifikasi, kualitas kinerja, serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program studi. Program studi memiliki sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, penghentian dosen, serta tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan penjaminan mutu program akademik.

b. Elemen Penilaian:

- 1) Kualifikasi akademik, kompetensi (pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional), jumlah (rasio dosen mahasiswa, jabatan akademik) dosen tetap dan tidak tetap (dosen mata kuliah, dosen tamu, dosen luar biasa maupun pakar keilmuan sesuai dengan kebutuhan) untuk menjamin mutu program akademik.
- 2) Prestasi dosen dalam mendapatkan penghargaan, ghibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari tingkat nasional maupun internasional; besaran dan proporsi dana penelitian baik dari sumber institusi sendiri maupun dari luar institusi.
- 3) Reputasi, keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik, dan profesi.
- 4) Jumlah, rasio, kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, analisis, teknisi, operator, programer, instruktur, staf administrasi, dan staf pendukung lainnya) untuk menjamin mutu penyelenggaraan program studi.
- 5) Keefektifan sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan penghentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik.

- 6) Sistem monitoring, evaluasi, rekam jejak kinerja akademik dosen, dan kinerja tenaga kependidikan.

## 5. Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik pada tingkat program studi. Kurikulum yang dirancang dan diterapkan harus mampu menjamin tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi. Kurikulum harus mampu menyediakan tawaran dan pilihan kompetensi serta pengembangan bagi pembelajar yang sesuai dengan minat dan bakat.

Proses pembelajaran yang diselenggarakan harus menjamin pelajaran untuk memiliki kompetensi yang tertuang dalam kurikulum. Suasana akademik di program studi harus menunjang pendidikan dalam meraih kompetensi yang diharapkan. Dalam pengembangan kurikulum program, proses pembelajaran, dan suasana akademik program studi harus kritis dan respon terhadap perkembangan kebijakan, peraturan perundangan yang berlaku, sosial, ekonomi, dan budaya.

### a. Deskripsi

Kurikulum merupakan suatu rancangan pada kegiatan pembelajaran sebagai rujukan program studi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan program studi. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakikat keilmuan bidang studi dan kebutuhan terhadap keilmuan mencakup standar mutu, dan visi, misi perguruan tinggi maupun program studi.

Untuk meningkatkan relevansi sosial dan keilmuan, kurikulum dapat dimutakhirkan pada program studi secara periodik agar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan perkembangan IPTEKS. Kurikulum merupakan acuan dasar pembentukan dan penjaminan

tercapainya kompetensi lulusan dalam setiap program pada tingkat program studi.

Kurikulum dinilai berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian dengan men-dorong terbentuknya *hard skills* dan *soft skills* (keterampilan kepribadian dan perilaku). Oleh karena itu, perguruan tinggi dapat menetapkan komponen kurikulum tertentu menjadi struktur kurikulum yang disusun oleh program studi.

Sistem pembelajaran dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah (domain) belajar dan hierarki. Kegiatan pembelajaran adalah pengalaman belajar yang diperoleh dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan (tatap muka dan jarak jauh), praktikum, magang, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas pada pembelajaran lainnya.

Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik agar dapat mengkondisikan peserta didik berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, serta bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber belajar. Pendekatan pembelajaran digunakan berorientasi pada peserta didik (*learner oriented*) dengan kondisi pembelajaran yang mendorong peserta didik belajar mandiri di mana untuk mengembangkan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skills*). Selain itu, pembelajaran yang dibangun mendorong mendemonstrasikan hasil belajar dalam berbagai bentuk kegiatan, unjuk kerja, kemampuan dan sikap terbuka untuk menyempurnakan kinerja tersebut.

Strategi pembelajaran memperhitungkan karakteristik peserta didik termasuk kemampuan awal dengan keberagaman yang dapat dilakukan dalam pembelajaran oleh dosen melalui strategi tersebut. Dalam mengaplikasikan strategi pembelajaran dapat menggunakan

konsep bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berkembang secara akademik dan profesional. Sistem pembelajaran mencakup pemantauan, pengkajian, dan perbaikan secara berkelanjutan. Kajian dan penilaian atas strategi pembelajaran yang digunakan dilakukan melalui perbandingan dengan strategi pembelajaran.

Evaluasi hasil belajar mencakup semua ranah belajar yang dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen, serta menggunakan penilaian acuan patokan. Evaluasi hasil belajar untuk mengukur prestasi akademik mahasiswa dan memberi masukan mengenai efektifitas proses pembelajaran.

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkan semangat dan interaksi akademik antar pihak kependidikan maupun dengan pihak luar untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik baik di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik ditujukan pada perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta penerapan kode etik akademik.

b. Elemen Penilaian:

- 1) Kurikulum harus memuat standar kompetensi lulusan terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya demi terwujud tujuan, misi, dan visi program studi.
- 2) Kurikulum harus memuat mata kuliah dengan mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minat serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah, silabus dan rencana pembelajaran.
- 3) Kurikulum harus dinilai berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian mendorong terbentuknya *hard skills* maupun *soft skills* di mana dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.

- 4) Kurikulum dan seluruh kelengkapan harus ditinjau ulang dalam kurun waktu tertentu oleh program studi bersama pihak yang terkait (relevansi sosial dan relevansi epistemologis) untuk menyesuaikan dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan pemangku kepentingan.
- 5) Sistem pembelajaran dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah belajar, dan hierarki.
- 6) Pembelajaran dilaksanakan menggunakan berbagai strategi dan teknik yang menantang, mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis bereksplorasi, berkreasi dan bereksperimen dengan memanfaatkan sumber belajar.
- 7) Pelaksanaan pembelajaran memiliki mekanisme untuk memonitor, mengkaji, dan memperbaiki secara periodik kegiatan perkuliahan (kehadiran dosen dan mahasiswa), penyusunan materi perkuliahan, serta penilaian hasil belajar.
- 8) Sistem perwalian: banyaknya mahasiswa per dosen wali, pelaksanaan kegiatan, rata-rata pertemuan per semester, efektivitas kegiatan perwalian.
- 9) Sistem pembimbingan tugas akhir (skripsi): rata-rata mahasiswa dilakukan per dosen pembimbing tugas akhir. Selain itu, rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan, kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir, ketersediaan panduan, dan waktu penyelesaian penulisan.
- 10) Upaya perbaikan sistem pembelajaran dilakukan selama tiga tahun terakhir.
- 11) Upaya peningkatan suasana akademik: Kebijakan tentang suasana akademik, ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana, program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik, interaksi akademik antara dosen-mahasiswa, serta pengembangan perilaku kecendekiawanan.

## 6. Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Pra-sarana, serta Sistem Informasi

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi yang mampu menjamin mutu penyelenggaraan program akademik. Sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi harus menjamin kelayakan, keberlangsungan, dan keberlanjutan program akademik di program studi. Agar proses penyelenggaraan akademik yang dikelola oleh program studi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien program studi harus memiliki akses yang memadai baik dari aspek kelayakan, mutu maupun kesinambungan terhadap pendanaan, prasarana dan sarana, serta sistem informasi.

Standar pendanaan, prasarana dan sarana serta sistem informasi merupakan elemen penting dalam penjaminan mutu akreditasi dapat merefleksikan kapasitas program studi dalam memperoleh, merencanakan, mengelola, dan meningkatkan mutu perolehan sumber dana, prasarana dan sarana, serta sistem informasi untuk mendukung kegiatan tri dharma program studi. Tingkat kelayakan dan kecukupan akan ketersediaan dana, pra-sarana dan sarana serta sistem informasi yang dapat diakses oleh program studi sekurang-kurangnya harus memenuhi standar kelayakan minimal.

Program studi harus melibatkan dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan kesinambungan ketersediaan sumber daya yang menjadi landasan dalam menetapkan standar pembiayaan, pra-sarana dan sarana, serta sistem informasi. Program studi harus berpartisipasi aktif dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahunan untuk mencapai target kinerja yang direncanakan (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

Program studi harus memiliki akses yang memadai untuk menggunakan sumber daya guna mendukung kegiatan tridharma program studi.

a. Deskripsi

Program studi menunjukkan adanya jaminan ketersediaan dana yang layak untuk penyelenggaraan program akademik yang bermutu, dan tertuang dalam rencana kerja, target kinerja, dan anggaran. Jaminan pembiayaan penyelenggaraan program akademik ditetapkan oleh institusi pengelola sumber daya, serta dikelola secara transparan dan akuntabel. Prosedur penganggaran yang efektif mencakup alokasi penggunaan dan pengendalian pengeluaran.

Sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan program akademik memenuhi kelayakan, baik dari sisi jenis, jumlah, luas, waktu, tempat, legal, guna, maupun mutu. Kelengkapan dan kualitas sumber daya pengoperasian dan perawatan yang memadai. Sesuai dengan visi program studi, dapat mengakses terhadap fasilitas dan peralatan, serta mendapatkan pelatihan untuk penggunaan. Pengelolaan prasarana dan sarana pada program studi memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesabilitas, pemeliharaan, perbaikan, penggantian, pemutakhiran, kejelasan peraturan, serta efisiensi dalam pemanfaatan.

Program studi memiliki jaminan akses dan pendayagunaan sistem manajemen dan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan, penyelenggaraan program akademik, kegiatan operasional, pengembangan program studi. Sistem manajemen informasi secara efektif dapat didayagunakan untuk mendukung proses pengumpulan data, analisis, penyimpanan, pengunduhan (*retrieval*), presentasi data, informasi, dan komunikasi dengan pihak yang bersangkutan.

b. Elemen Penilaian:

- 1) Keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan/ alokasi dan

pengelolaan dana. Keterlibatan aktif program studi harus mencerminkan pada proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan, serta pertanggungjawaban penggunaan dana melalui mekanisme yang *transparan* dan *akuntabel*.

- 2) Dana operasional dan pengembangan (termasuk ghibah) dalam lima tahun terakhir untuk mendukung kegiatan program akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) program studi harus memenuhi syarat kelayakan jumlah dan tepat waktu.
  - 3) Ruang kerja dosen dengan memenuhi kelayakan dan mutu aktivitas kerja, pengembangan diri, dan pelayanan akademik.
  - 4) Akses dan pendayagunaan sarana digunakan dalam proses administrasi dan pembelajaran, serta penyelenggaraan kegiatan tridharma secara efektif.
  - 5) Akses dan pendayagunaan prasarana menunjang proses administrasi dan pembelajaran, serta penyelenggaraan kegiatan tri dharma secara efektif.
  - 6) Akses dan pendayagunaan sistem informasi dalam pengelolaan data, dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi tersebut.
7. Standar 7. Penelitian, Pelayanan/ Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu, kerjasama diselenggarakan untuk pengembangan mutu program studi. Kelayakan penjaminan mutu sangat dipengaruhi oleh mutu pengelolaan dan pelaksanaan.

Sistem pengelolaan pendidikan, penelitian, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, serta kerjasama yang terintegrasi dengan penjaminan mutu program studi. Pada tahapan standar ini

bertujuan untuk mendukung terwujudnya visi, terselenggaranya misi, tercapainya tujuan, dan keberhasilan strategi perguruan tinggi tersebut. Standar ini merupakan elemen dalam penjaminan mutu akreditasi program studi merefleksikan kapasitas dan kemampuan dalam memperoleh, merencanakan (kegiatan dan anggaran), mengelola dan meningkatkan mutu penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama.

Program studi harus berpartisipasi aktif dalam pengelolaan, pemanfaatan, kesinambungan penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama pada jenjang perguruan tinggi. Program studi memiliki akses dan mendayagunakan sumber daya guna mendukung kegiatan penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama.

a. Deskripsi:

Penelitian adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi pada proses pembelajaran, pengembangan IPTEKS (ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni), serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Program studi memiliki akses atau *road map*, dan pelaksanaan penelitian menunjang terwujud visi dan terlaksana misi program studi dan institusi, serta akses terhadap fasilitas penelitian.

Dosen dan mahasiswa program studi terlibat dalam pelaksanaan penelitian bermutu dan terencana dengan berorientasi pada kebutuhan. Hasil penelitian didiseminasikan melalui pre-sentasi ilmiah dalam forum ilmiah nasional dan internasional dan dipublikasikan dalam jurnal nasional yang terakreditasi sangat baik.

Program studi berpartisipasi aktif dalam perencanaan, implementasi program, kegiatan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat dengan membuktikan efektifitas pemanfaatan dalam masyarakat. Pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat dilaksana-

kan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni upaya memenuhi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Program studi berpartisipasi aktif dalam perencanaan, implementasi, pengembangan program, dan kegiatan kerjasama oleh institusi dalam rangka meningkatkan keilmuan dosen dan mahasiswa, serta sumber daya lain dimiliki institusi dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

b. Elemen Penilaian:

- 1) Partisipasi aktif dalam perencanaan, implementasi, peningkatan mutu penelitian, pelayanan, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang mendukung keunggulan diharapkan pada visi, misi program studi, dan institusi.
- 2) Kejelasan, transparansi, akuntabilitas sistem pengelolaan penelitian, pelayanan, dan pengabdian kepada masyarakat termasuk proses monitoring, evaluasi, peninjauan ulang strategi secara periodik dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan.
- 3) *Benchmark*, target mutu penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Dukungan, komitmen institusi pada program studi dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pendanaan secara internal dari perguruan tinggi dalam upaya kerjasama, fasilitas yang sesuai dengan program, kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama.
- 5) Partisipasi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama.
- 6) Aktivitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama yang berkontribusi dan berdampak pada proses pembelajaran.

- 7) Produktifitas, mutu hasil penelitian dosen dan mahasiswa program studi yang diakui oleh masyarakat akademis (publikasi dosen pada jurnal nasional terakreditasi - kuantitas dan produktifitas; publikasi dosen pada jurnal internasional - kuantitas dan produktifitas; sitasi hasil publikasi dosen; karya inovatif (paten, karya/produk monumental).
- 8) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa program studi berguna untuk kepentingan (kerjasama, karya, penelitian, dan pemanfaatan jasa/ produk kepakaran).
- 9) Jumlah, mutu kerjasama efektif yang mendukung pelaksanaan misi program studi, institusi, dampak kerjasama untuk penyelenggaraan dan pengembangan program studi.

## **D. Model-Model Evaluasi Program**

### **1. Pengertian Program**

Program adalah suatu rangkaian kegiatan sebagai bentuk implementasi dari suatu kebijakan. Pengertian secara umum, program diartikan sebagai "rencana" yang dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Terkait dengan evaluasi program, program didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang realisasi/ implementasi dari suatu kebijakan berlangsung dalam proses berkesinambungan yang terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang (Suharsimi dan Cipi Safruddin, 2009).

Dalam pengertian ini, definisi program mencakup tiga persyaratan, yaitu: (1) Program sebagai realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan; (2) Berlangsung dalam waktu yang relatif lama, bukan kegiatan tunggal berkesinambungan; dan (3) Terjadi pada organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Program ini mencakup program Peringatan Hari Besar Nasional oleh OSIS di sekolah atau oleh Unit Kegiatan Mahasiswa.

Kegiatan dalam program ini dapat diklasifikasikan sebagai program yang mengandung beberapa komponen kegiatan seperti kegiatan peringatan HUT Proklamasi, Hardiknas, Harkitnas, dan sebagainya. Selain itu, program tersebut memuat kegiatan terdiri penggalangan dana, pembentukan kepanitiaan, perizinan hingga kegiatan pelaksanaan.

Adapun program yang menunjukkan ciri khusus, yaitu kegiatan jamak. Contoh: Program pembelajaran adalah kegiatan jamak mengandung kegiatan diantaranya penyusunan kurikulum, penyusunan perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan evaluasi. Sesuai dengan bentuk kegiatan, program dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

a. Program Prosesan

Program prosesan adalah program yang kegiatan pokok dapat mengubah bahan mentah (*raw input*) menjadi bahan jadi sebagai hasil proses yang disebut sebagai *output* (luaran). Ciri khusus dari program ini adalah kegiatan mengubah bahan mentah sebagai masukan untuk diolah dan ditransformasikan menjadi bahan baru (yang kondisinya lebih baik) sebagai produk kesesuaian oleh suatu program. Contoh : Program pembelajaran kegiatan adalah memberikan perubahan siswa yang belum menguasai ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui suatu proses transformasi. Dengan demikian, disebut program pembelajaran.

b. Program Layanan

Program layanan (*service*) adalah suatu kesatuan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pihak yang dilayani (pelanggan) sehingga dapat terpenuhi sesuai kebutuhan. Contoh: program layanan perpustakaan, dan program koperasi. Orientasi dari program layanan ini adalah kepuasan pelanggan (*customer*

*satisfaction*) atas kebutuhan pelanggan sesuai yang dijanjikan oleh suatu program.

c. Program Umum

Tidak seperti pada program pemrosesan dapat dikenali komponen program seperti: masukan (*input*), kegiatan pemrosesan, dan komponen luar (*output*) maupun program layanan yang dapat dikenali kebutuhan pelanggan. Contoh: Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS), program peringatan lustrum sekolah, dan sebagainya.

## 2. Model-model Evaluasi Program

Mengingat program sebagai suatu rangkaian kegiatan yang berimplementasi dari suatu kebijakan. Pada Hakikatnya, evaluasi program merupakan kegiatan evaluasi terhadap implementasi pada suatu kebijakan. Dalam studi analisis kebijakan publik salah satu cabang bidang kajian adalah Evaluasi Kebijakan. Evaluasi kebijakan dilakukan pada dasarnya setiap kebijakan negara (*public policy*) mengandung resiko untuk mengalami kegagalan.

Abdul Wahab (1990), mengutip pendapat Hogwood dan Gunn menjelaskan bahwa penyebab dari kegagalan suatu kebijakan dapat dibagi menjadi 2 kategori yang disebabkan beberapa diantaranya, yaitu: ( 1 ) *Non-implementation*" a t a u l a k s a n a s e s u k i d e n g a n r e n c a n a *Unsuccessful*" ( 2 ) t a u i m p l e m e n t a s i y a

Dengan demikian, tidak terimplementasi dari suatu kebijakan yang belum dilaksanakan sesuai yang direncanakan. Sedangkan, implementasi yang tidak berhasil terjadi sebagai akibat suatu kebijakan yang dilaksanakan sesuai rencana. Hal ini dikarenakan adanya faktor eksternal kurang di mana dari suatu kebijakan yang tidak berhasil.

Isaac mengutip dari Fernandes (1984) membedakan model evaluasi program berdasarkan orientasi, yaitu sebagai berikut: (1) Model yang berorientasi pada tujuan (*goal oriented*); (2) Model yang berorientasi pada keputusan (*decision oriented*); (3) Model yang berorientasi pada kegiatan dan orang yang menangani; dan (4) Model yang berorientasi pada pengaruh dan dampak program.

Ada banyak model evaluasi program yang dikembangkan dalam mengevaluasi suatu program pembelajaran. Adapun model sebagaimana yang dikemukakan oleh Kirkpatrick (2009) adalah:

- a. Jack Phillips Five Level ROI Model
- b. Daniel Stufflebeam (Context, Input, Process, Model Product)
- c. Robert Stake Responsive Evaluation Model
- d. Robert Stake Congruence-Contingency Model
- e. Kaufman Five Levels of Evaluation
- f. CIRO (Context, Input, Reaction, Outcome)
- g. PERT (Program Evaluation and Review Technique)
- h. Alkins UCLA Model
- i. Michael Gsat-Free Evaluation Approach
- j. Provost Discrepancy Model
- k. Eisner Connoisseurship Evaluation Models
- l. Illuminative Evaluation Model
- m. Portraiture Model.

Dari berbagai model diatas, model yang digunakan sebagai strategi atau pedoman kerja dalam pelaksanaan evaluasi program adalah sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Model Kirkpatrick (Kirk-patrick *Four Levels Evaluation Model*),
- 2) Evaluasi Model CIPP (*Context, Input, Prosess, and Product*), dan
- 3) Evaluasi Model Stake (*Model Couintenance*).

Evaluasi model CIPP atau *the CIPP model* merupakan model evaluasi yang diterapkan oleh evaluator. Model evaluasi ini dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam dan Egon Guba (1976) di Ohio State University. Kata CIPP kepanjangan dari *context, Input, process* dan *product*. Seorang evaluator dari University of Washington bernama Gilbert Sax (1980) kemudian disempurnakan model evaluasi CIPP dengan satu komponen tambahan O, yaitu singkatan dari *out-come* yang menjadi model evaluasi CIPPO. Apabila model CIPP hanya pada mengukur *output (product)*, maka CIPPO sampai kepada implementasi *product*.

Model evaluasi CIPP dalam W. James Popham (1992) didefinisikan sebagai sebagai *process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives*. Pendekatan yang digunakan dalam evaluasi model CIPP berorientasi pada pemegang keputusan (*a decision oriented evaluation approach structured*).

Sehingga dalam membuat pedoman kerja untuk melayani manajer dan administrator model evaluasi CIPP ada empat macam keputusan pendidikan, meliputi beberapa diantaranya:

- a) *Context evaluation to serve planning decision*. Konteks evaluasi ini membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan dicapai oleh program, dan merumuskan tujuan program.
- b) *Input evaluation, structure decision*. Evaluasi ini mengatur keputusan, menentukan sumber yang ada, alternatif yang diambil, rencana dan strategi sebagai kebutuhan, dan prosedur kerja untuk ketercapaian suatu program.
- b. *Process evaluation, to serve implementing decision*. Evaluasi proses ini dalam rangka untuk membantu mengimplementasikan keputusan sejauhmana rencana yang diterapkan, prosedur yang dapat dimonitoring, dikontrol, dan diperbaiki.

- c. *Product evaluation, to serve recycling decision.* Evaluasi produk ini untuk membantu keputusan selanjutnya. Huruf pertama dari konteks evaluasi dijadikan ringkasan CIPP yang dapat dikembangkan dalam suatu program model ini yang kemudian diperkenalkan Stufflebeam (Farida, 2008: 14).

Titik awal kegiatan evaluasi program sebagai penyusun program untuk ketercapaian kualitas dari kegiatan tersebut. Di samping itu, jika program yang sudah direncanakan belum tercapai bagaimana tindakan yang semestinya dilakukan. Evaluasi program diadakan untuk melihat pencapaian target program. Dengan demikian, dalam penelitian model ini diuraikan di gunakan yakni sebagai evaluasi program model CIPP (*Context, Input, Proses, and Product*).

### **3. Evaluasi Program Model CIPP (*Context, Input, Proses, and Product*)**

Konsep evaluasi model CIPP (*Context, Input, Proses, and Product*) pertama kali dikemukakan oleh Stufflebeam tahun 1965 untuk mengevaluasi ESEA (The Elementary and Secondary Education Act). Konsep ini dinyatakan Stufflebeam dengan pandangan bahwa tujuan penting evaluasi untuk memperbaiki. Hal ini dipertegas oleh Madaus dkk (1983: 118) dengan mengemukakan *the CIPP approach is based on the view that the most important purpose of evaluation is not to prove but to improve.*

Evaluasi model CIPP dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, manajemen, perusahaan dan berbagai tingkatan baik proyek, program maupun institusi. Dalam bidang pendidikan, Stufflebeam (2003) menggolongkan sistem pendidikan empat dimensi yaitu *context, input, process, dan product.*

Sudjana dan Ibrahim (2004: 246) menerjemahkan masing-masing dimensi dengan makna:

- a) *Context*, situasi/ latar belakang yang mempengaruhi jenis, tujuan, dan strategi pendidikan dikembangkan dalam sistem yang bersangkutan. Situasi ini merupakan faktor eksternal, seperti masalah pendidikan yang dialami, keadaan ekonomi negara, dan pandangan hidup masyarakat.
- b) *Input*, sarana/modal/bahan, dan rencana strategi ditetapkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Komponen input yang meliputi siswa, guru, desain, sarana, dan fasilitas.
- c) *Process*, pelaksanaan strategi, dan penggunaan sarana/modal/bahan di dalam kegiatan di lapangan. Komponen proses meliputi kegiatan pembelajaran, pembimbingan, dan pelatihan.
- d) *Product*, hasil yang dicapai pada pengembangan sistem pendidikan yang bersangkutan dalam komponen produk meliputi pengetahuan, kemampuan, dan sikap (siswa dan lulusan).

Menurut Stufflebeam dalam Oliva (1992:491) pada aspek, dan prosedur pelaksanaan evaluasi model CIPP seperti pada Tabel 1. Sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Aspek dan Prosedur Pelaksanaan Evaluasi Model CIPP**

	<i>Context Evaluation</i>	<i>Input Evaluation</i>	<i>Process Evaluation</i>	<i>Product Evaluation</i>
Obyek (sasaran)	Mendefinisikan operasional <i>context</i> , mengidentifikasi, memperkirakan kebutuhan diagnosa masalah, memprediksi kebutuhan, dan peluang.	Mengidentifikasi, memperkirakan sistem, kapabilitas strategi input yang tersedia, dan mendesain untuk implementasi strategi.	Mengidentifikasi, memperkirakan proses tentang kerusakan di dalam desain prosedur atau implementasi, menyediakan	Menghubungkan informasi <i>out-comes</i> dengan obyek, informasi <i>context, input, dan process</i> .

			informasi sebelum program diputuskan, memperbaiki dokumen event prosedural, dan aktivitas.	
Metode	Mendeskripsikan <i>context</i> , membandingkan dengan sebenarnya, mengawasi <i>input</i> dan <i>output</i> , membandingkan kemungkinan dan ketidakmungkinan sistem kerja, dan menganalisa penyebab ketidakmungkinan dan ketidaksesuaian kenyataan dengan tujuan (harapan).	Mendeskripsikan dan menganalisis SDM dan sumber daya material yang tersedia, solusi strategis, dan desain prosedural untuk relevansi, kemungkinan kegiatan yang dapat dilaksanakan, dan kebutuhan ekonomi dalam rangkaian kegiatan.	<i>Memonitoring</i> setiap aktivitas yang berpotensi terdapat tantangan secara prosedural, dan memberikan tanda untuk antisipasi untuk memperoleh informasi yang spesifik untuk memutuskan suatu program, dan mendeskripsikan proses yang aktual.	Mendefinisikan operasional dan mengukur kriteria asosiasi dengan obyektif dan membandingkan hasil pengukuran dengan standar sebelum dilakukan antisipasi, dan menginterpretasi <i>outcomes</i> berdasarkan dokumen informasi <i>context</i> , <i>input</i> , dan <i>process</i> .
Hubungan pengambilan keputusan dengan proses perubahan	Memutuskan dalam hal menyajikan perangkat, tujuan asosiasi, dengan mendiskusikan kebutuhan dan peluang, dan sasaran asosiasi untuk perubahan perencanaan kebutuhan.	Memilih SDM sebagai pendukung, solusi strategis, dan desain prosedural untuk perubahan struktur kerja (aktivitas).	Untuk implementasi dan memperbaiki desain program dan prosedur untuk efektivitas proses kontrol.	Untuk memutuskan dalam kegiatan secara kontinu, menghentikan (mengakhiri), modifikasi, mengatur kembali fokus perubahan aktivitas dengan tahapan materi yang lain dalam proses perubahan

				untuk mengatur kembali aktivitas perubahan.
--	--	--	--	---

Stufflebeam dalam naskah yang dipresentasikan pada *Annual Conference of the Oregon Program Evaluation Network (OPEN)* Portland tahun 2003 dapat memperluas makna evaluasi *product* menjadi *impact evaluation* (evaluasi pengaruh), *effectiveness evaluation* (evaluasi efektivitas), *sustainability evaluation* (evaluasi keberlanjutan), dan *transportability evaluation* (evaluasi transformasi) (Stufflebeam, 2003:59-62).

# **BAB III**

## **METODOLOGI**

### **A. Metode Penelitian**

Sebelum menjadi literatur, tim penulis menggunakan pendekatan penelitian evaluasi terpacu pada pengumpulan data, penyajian data yang akurat, objektif, dan menarik kesimpulan berdasarkan kriteria ditetapkan. Sebagaimana dikemukakan Nana Syaodih (2005:120) penelitian evaluasi merupakan suatu desain, prosedur evaluasi dalam mengumpulkan data, dan menganalisis data secara sistematis dalam menentukan nilai atau manfaat dari suatu praktik (pendidikan).

Nilai atau manfaat dari suatu praktik pendidikan didasarkan atas hasil pengukuran atau pengumpulan data dengan menggunakan standar. Berdasarkan akurasi, dan objektivitas informasi dapat diperoleh dari Implementasi Standar BAN-PT dalam penyelenggaraan Pelayanan di FTIK IAIN Pontianak tahun 2015.

Riset Evaluasi merupakan salah satu bentuk penelitian terapan (*applied research*). Jika dibandingkan dengan jenis penelitian lain, riset evaluasi mempunyai kesamaan dalam pemilihan pendekatan, metodologi, penentuan subyek, sampling maupun prosedur riset. Perbedaannya

adalah pada tujuan dari riset. Sedangkan, riset konvensional orientasi pada kesimpulan dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, akumulasi teori, dan adaptasi teori yang dilandasi dengan rasa ingin tau (*curiosity*).

Sedangkan, riset evaluasi dilakukan berdasarkan kebutuhan informasi untuk merumuskan kebijakan, kebutuhan menyusun program. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Nisbet (1999) yang menyatakan bahwa perbedaan esensial antara riset evaluasi dan riset konvensional (riset dasar) adalah pada tujuan dalam pemilihan subyek, dan metode.

Ditinjau dari jenis data yang dikumpulkan, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menangani data-data yang bersifat kuantitatif (angka). Sedangkan, pendekatan kualitatif digunakan untuk menjelaskan secara mendalam dengan data kualitatif di mana diperoleh dari hasil dokumentasi dan wawancara komprehensif.

Tidak mengherankan jika dalam penelitian kemudian tim penulis menggunakan pendekatan evaluasi berorientasi keahlian (*Expertise-oriented evaluation*). Evaluasi berorientasi keahlian ini menggunakan standar keahlian yang diarahkan pada evaluasi program dan komponen dengan menggunakan standar yang diambil dari teori/konsep yang dirumuskan oleh para ahli sebagai suatu program.

## **1. Objek Penelitian**

Adapun objek kajian dalam penelitian adalah implementasi standar penilaian akreditasi program studi sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Pontianak. Di samping itu, fokus penelitian dipusatkan pada penerapan Standar Pendidikan dan pembelajaran di lingkungan FTIK IAIN Pontianak, ketersediaan

pimpinan, sumber daya dosen dan tenaga administrasi dalam mendukung penerapan, serta kendala yang dihadapi FTIK IAIN Pontianak dalam implementasi standar nasional pendidikan tinggi.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian tentang implementasi standar penilaian akreditasi program studi sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode Penelitian Kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2012: 8) yaitu :

Metode penelitian berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, Sugiyono (2012:13) menyatakan penelitian deskriptif yaitu, penelitian dapat dilakukan untuk mengetahui nilai satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan dengan menghubungkan variabel yang lain.

Berdasarkan teori, penelitian deskriptif kuantitatif merupakan data diperoleh dari sampel dan populasi penelitian yang dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran dan keterangan mengenai implementasi 7 dari 8 standar penilaian akreditasi program studi sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang dilaksanakan di FTIK IAIN Pontianak.

## **B. Sumber Data**

Data adalah bahan dan informasi yang memberikan keterangan pada objek penelitian pada aspek materi. Di samping itu, Muhajir (2002:44) menjelaskan bahwa data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk verbal. Data dalam bentuk kata verbal sering muncul dalam kata yang berbeda dengan maksud sama atau sebaliknya. Hal ini juga muncul dalam kalimat panjang lebar yang dapat dideskripsikan, singkat dan perlu diolah agar menjadi ringkas dan sistematis.

Data dalam penelitian ini bersumber dari pihak yang terkait dalam Implementasi standar penilaian akreditasi program studi sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) di FTIK IAIN Pontianak. Data ini dibagi dalam dua sumber data yakni data primer dan data sekunder.

### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diambil dari sumber pertama di lapangan melalui teknik wawancara terhadap informan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak pelaksana standar penilaian akreditasi program studi sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Jurusan yang ada di lingkungan FTIK dan tenaga administrasi fakultas dapat mendukung operasional kegiatan Jurusan. Selain wawancara data primer ini juga diperoleh dari hasil observasi langsung di Jurusan dan ruang tenaga administrasi fakultas tersebut.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, arsip dan data, serta informasi lainnya terkait hubungannya dengan kebijakan Implementasi standar penilaian akreditasi program studi sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) di FTIK IAIN Pontianak. Data sekunder diperoleh dari hasil laporan tertulis (dokumen) fakultas dengan Implementasi Standar Penilaian Akreditasi

Program Studi Sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) FTIK IAIN Pontianak, peraturan yang sudah ditetapkan.

### 3. Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini secara *purposive*, yaitu dilakukan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penelitian informan adalah ditentukan sesuai dengan kepemilikan informasi yang kredibel dengan Implementasi standar penilaian akreditasi program studi sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) di FTIK IAIN Pontianak ( meliputi : Dekan, Wadep 1, 2, 3, Kajur dan Sekjur PAI, PBA, PGMI dan PGRA, serta Staf Administrasi FTIK IAIN Pontianak).

### C. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Suharsimi Arikunto (2002: 197), teknik pengumpulan data adalah digunakan peneliti dalam pengumpulan data penelitian. " Berdasarkan pengertian adalah cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Adapun alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### 1. Quesioner

Menurut Arikunto (2002: 200) " pernyataan tertulis digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang pribadi atau hal-hal yang diketahui ". S (2012: 142) menyatakan bahwa " Angket teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis

Adapun sampel sesuai dengan karakteristik questioner mengenai masalah penelitian adalah angket yang dipertanyakan oleh peneliti kepada responden mengenai implementasi delapan standar penilaian akreditasi program studi sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi (BAN-PT) yang telah diterapkan di FTIK IAIN Pontianak pada tahun 2015. Dalam hal ini angket disebarakan diberbagai pihak terkait dengan penerapan standar penilaian akreditasi program studi sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

## **2. Teknik Komunikasi langsung /Wawancara**

Wawancara digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara mendalam merupakan proses tanya jawab mengenai masalah penelitian antara peneliti dengan informan dilakukan secara terbuka. Oleh karena itu, pedoman *interview* digunakan harus memberikan kebebasan informan untuk menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan implementasi standar penilaian akreditasi program studi sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)di FTIK IAIN Pontianak.

## **3. Teknik Dokumentasi**

Menurut Arikunto (2006:206) " Dokumentasi adalah mengumpulkan data mengenai arsip yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, r a p o t , a g e n d a , d a n s

Menurut Sugiyono (2003:83) studi dokumentasi merupakan perlengkapan dari teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen berupa studi kepustakaan yakni penelusuran, pengumpulan, pencatatan data tertulis, keterangan ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal serta dokumen yang berisi peraturan berkaitan dengan implementasi delapan standar penilaian akreditasi program studi sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) .

## **4. Instrumen Penelitian**

Dalam Penelitian Implementasi Standar Nasional Perguruan Tinggi di FTIK IAIN Pontianak instrumen penelitian adalah peneliti (*human instrument*) bertindak sebagai perencana, pelaksana dalam

pengumpulan data, melakukan analisis, menafsirkan data, dan membuat laporan penelitian. Peneliti mewawancarai informan, mencatat berbagai informasi penting berkaitan dengan Implementasi standar penilaian akreditasi program studi sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) di FTIK IAIN Pontianak.

#### **D. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara Nana Sudjana (2001: 64), menyatakan bahwa data bertujuan mengubah data mentah dari hasil pengukuran menjadi data yang lebih halus sehingga memberikan a Sedangkan, Iqbal Hasan (2006: 32) menyatakan bahwa pengolahan data dalam penelitian ini kegiatan meliputi antara lain :

##### **1. Editing**

*Editing* adalah pengecekan/pengoreksian data yang terkumpul. Tujuan ini untuk menghilangkan kesalahan yang terdapat pada pencatatan dilapangan yang bersifat koreksian. *Editing* dalam penelitian ini yaitu mengecek/mengoreksi quesioner penelitian yang telah disebar.

##### **2. Coding (Pengkodean)**

*Coding* adalah pemberian kode pada tiap data termasuk dalam kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam bentuk angka atau huruf yang memberikan petunjuk dan identitas pada informasi data yang akan dianalisis. *Coding* dalam penelitian ini memberikan kode terhadap quesioner yang di analisis, dari 215 quesioner yang tersebar masing-masing quesioner diberikan angka 1 – 215 dapat membedakan jawaban dari tiap responden.

### **3. Tabulasi**

Tabulasi adalah pembuatan tabel yang berisi data kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Dalam melakukan tabulasi dibutuhkan ketelitian agar tidak terjadi kesalahan. Tabulasi dalam penelitian ini yaitu jawaban dari questioner yang disebar dan dimasukkan dalam tabel sesuai dengan analisis. Contoh: Tabulasi karakteristik responden meliputi usia, jenis kelamin dan aktivitas responden.

### **4. Pemberian Skor atau Nilai**

Dalam pemberian skor digunakan skala ordinal salah satu cara untuk menentukan skor tersebut. Menurut Sarjono dan Julianita (2011:3), skala ordinal adalah skala yang menyatakan kategori sekaligus peringkat di mana peringkat menunjukkan suatu urutan penilaian. Skala yang digunakan adalah 1 sampai 4. Kemudian, jawaban setiap item pertanyaan menggunakan skala ordinal yang ditentukan tingkatan nilai yaitu sebagai berikut :

Penentuan skor dalam penelitian ini yaitu jawaban dari pertanyaan terdapat dalam questioner di analisis dengan menggunakan skala 1 – 4. Untuk jawaban terendah mendapat point 1. Sedangkan, jawaban tertinggi mendapat point 4.

Adapun item pertanyaan pada masing-masing standar angket penelitian berbeda, yaitu pada angket standar satu terdapat enam pertanyaan, angket standar dua terdapat 31 pertanyaan, angket standar tiga terdapat 17 pertanyaan, angket standar empat 26 pertanyaan, standar lima 28 pertanyaan, angket standar enam 18 pertanyaan dan angket standar tujuh dengan 8 pertanyaan.

Dengan jumlah pertanyaan item dapat diperoleh skor maksimal dari masing-masing jawaban yang akan dibagi jumlah soal.

Kemudian, ditentukan skala kategori jika skor maksimal adalah 112 soal maka perhitungan kategorinya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Skala Kategori Implementasi Standar Penilaian Akreditasi**  
**Program Studi Sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan**  
**Tinggi (BAN-PT) FTIK IAIN Pontianak**

Nilai	Rentang Nilai	Kategori
4	85 – 112	Sangat Baik
3	57 – 84	Baik
2	29 – 56	Cukup
1	0 – 28	Kurang

#### **E. Teknik Analisa Data**

Dalam penelitian kuantitatif, analisa data merupakan suatu kegiatan data dari lapangan yang terkumpul. Adapun analisa data dalam penelitian ini meliputi lima langkah atau 5 M sebagaimana Agus Purwoto (2007:1) menyatakan bahwa tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

“Mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel seluruh responden, menyajikan data setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, tujuan penelitian, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis maupun pertanyaan yang diajukan dalam penelitian.”

Selanjutnya metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif persentase. Metode ini digunakan untuk mengkaji variabel pada penelitian yaitu implementasi standar penilaian

akreditasi program studi sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) di FTIK IAIN Pontianak.

Deskriptif persentase ini diolah dengan cara frekuensi dibagi dengan jumlah responden dikali 100 %, seperti yang dikemukakan Nana Sudjana (2001: 128) adalah sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

**Keterangan :**

- P : Presentase jawaban
- F : Frekuensi nilai yang diperoleh dari seluruh item
- N : Jumlah responden
- 100 % : Bilangan tetap

Jawaban dari kuesioner atau angket yang telah disebar, di analisis dengan rumus presentase (%) yaitu banyaknya jawaban dibagi dengan jumlah keseluruhan responden dikali dengan 100%. Selanjutnya data diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan teori dan beberapa hasil penelitian terdahulu.

**F. Lokasi dan Jadwal Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Kegiatan penelitian ini dilakukan selama 6 bulan mulai dari Juni sampai November 2015.

Secara rinci jadwal kegiatan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.2**  
**Jadwal Kegiatan Penelitian**

No	Urutan Kegiatan	Tahun 2015					
		Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop
1	Penjajakan Awal Menemukan Masalah						
2	Penyusunan Proposal						
3	Penelusuran Kepustakaan						
4	Penyusunan Intrumen Penelitian						
5	Pengumpulan data						
6	Pemeriksaan keabsahan Data						
7	Penyusunan Laporan Penelitian						



# **BAB IV**

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum FTIK IAIN Pontianak 1. Sejarah Singkat FTIK IAIN Pontianak**

Berdasarkan website resmi IAIN Pontianak ([www.iainpontianak.ac.id](http://www.iainpontianak.ac.id)) diakses tanggal 26-09-2015) latar belakang berdirinya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak bermula dibentuknya Yayasan Sadar yang diketuai oleh A. Muin Sanusi, Walikota Pontianak saat itu. Selain yayasan tersebut, dibentuk pula Dewan Kurator yang diketuai oleh Brigjend Ryacudu, Pangdam XII Tanjungpura.

Kemudian, akibat mutasi beberapa anggota tahun 1975 diadakan *resuffle* Dewan Kurator sehingga Brigjend. Kadarusno-Gubernur Kalimantan Barat terpilih sebagai ketua baru. Di dalam yayasan Dewan Kurator inilah ulama aparaturnya Pemerintah Daerah, dan masyarakat Kalbar bekerjasama merajut asa dengan mewujudkan cita-cita agar di daerah ini berdiri sebuah lembaga pendidikan tinggi agama Islam.

Di awal langkahnya, pada bulan Juli 1965, yayasan mendirikan Fakultas Tarbiyah di Pontianak yang kemudian disusul dengan Fakultas Ushuluddin di Singkawang. Setelah berjalan selama 4 (empat) tahun, Fakultas ini bersama-sama dengan Fakultas Ushuluddin Singkawang berubah menjadi negeri dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama No. 26 Tahun 1969 tanggal 6 Agustus 1969 sebagai cabang dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta oleh KH. Moh. Dahlan selaku Menteri Agama RI pada saat itu.

Sekitar awal 1969 berdasarkan dokumen kesepakatan antara yayasan sadar pembina Fakultas Tarbiyah Pontianak dengan Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dikirimkan 3 (tiga) orang dosen dari IAIN Jakarta yaitu Drs. Ahmad Lujito (Ahli Ilmu pendidikan), Drs. Mardiyono (Ahli bahasa Arab), dan Drs. Moh. Ardani (Ahli ilmu agama).

Kemudian, berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 93 Tahun 1973 tentang pemindahan Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah di Singkawang ke Fakultas Tarbiyah di Pontianak maka Fakultas Ushuluddin di Singkawang akan digabungkan ke Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah di Pontianak. Surat Keputusan ditandatangani oleh H. A. Mukti Ali selaku Menteri Agama RI pada bulan Oktober 1973.

Setelah berjalan selama 8 (delapan) tahun, Fakultas Muda Cabang IAIN Jakarta dapat memberikan lulusan Sarjana Muda. Kemudian, berkembang menjadi Fakultas Madya pada tahun 1982. Sejak tahun 1982 lembaga ini sudah memiliki kewenangan untuk menghasilkan sarjana. Bersamaan dengan perkembangan kelembagaan, status fakultas cabang berubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta di Pontianak.

Pada tanggal 1 Desember 1975 Menteri Agama RI mengeluarkan SK tentang pembentukan dewan kurator Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Cabang pontianak dengan Brigadir Jenderal Kadarusno (selaku Gubernur Kalbar pada saat itu) sebagai Ketua. Mochammad Barir, SH (selaku Walikota pontianak) sebagai Wakil Ketua, dan Drs. H. Moh. Ardani (selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Cab. pontianak) sebagai sekretaris.

Kemudian ada 12 orang anggota yaitu M. Yusuf Syueb, Dr. H. Soegeng, Drs. Batara Batubara, Moh. Damiri, Chatib Sjarbaini, Ust. H. A. Rani Mahmud, Tan Abdullah, Drs. Tammar Abdul Salam, Drs. Abdul Rasyid, Usman Samad BA, Ir. Said J a f a r d a satu nama yang tidak terbaca lagi di SK tersebut. Dewan Kurator ini berdasarkan SK berfungsi sebagai dewan penyantun keperluan/kebutuhan Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Cabang di Pontianak.

Lima belas tahun kemudian, melalui Keputusan Presiden No. 11 tanggal 21 Maret 1997 yang bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1417 H. Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta di pontianak bersama-sama dengan 32 Fakultas IAIN lainnya di seluruh Indonesia berubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak.

Independensi yang menjadi konsekuensi dari alih status di atas disambut oleh STAIN Pontianak dengan berbagai kegiatan penataan diri. Penataan ini meliputi penataan organisasi, kurikulum, ketenagaan, dan lain-lain. Penataan infrastruktur semacam ini membutuhkan proses waktu. Oleh karena itu, sejak awal STAIN Pontianak menggariskan prinsip dinamisme dan fleksibilitas dalam pengelolaan pendidikan. Penggarisan prinsip ini adalah agar prog-

ram yang dikelola bersifat adaptif, *progressive* dan tak kalah pentingnya adalah *market oriented*.

Pada tanggal 30 Juli 2015 Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 Tentang perubahan bentuk STAIN Pontianak menjadi IAIN Pontianak. Peresmian alih status ini yang kemudian diresmikan pada tanggal 01 April 2014.

Dari sejak berdiri hingga tahun 2015 dilakukan penelitian FTIK IAIN Pontianak telah memiliki 4 jurusan, yaitu Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Pendidikan Guru Raudhatul Athfal.

### **1. Visi Misi FTIK IAIN Pontianak**

Adapun visi FTIK IAIN Pontianak pendidikan, pengembangan tenaga pendidik, kependidikan yang unggul, terkemuka dan terbuka dalam riset keilmuan, keislaman serta kebudayaan Borneo (*Becoming an open, excellent, and leading center for education and development of educators as well as for scientific, Islamic and Borneo cultural research*) " .

Sedangkan Misi FTIK IAIN Pontianak adalah untuk mewujudkan misi diatas adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran dalam bidang pendidikan, keilmuan dan keislaman secara profesional.
- b. Mengembangkan kegiatan riset dalam bidang pendidikan, keilmuan, keislaman dan kebudayaan.
- c. Mengembangkan, memperdalam dan menyebarkan penelitian keilmuan dalam bidang pendidikan dan pengajaran dengan memperkuat basis riset kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.

## 2. Struktur Organisasi FTIK IAIN Pontianak

Organisasi merupakan tempat atau wadah orang berkumpul, bekerjasama secara rasional, sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana-prasarana, data dan lain sebagainya secara efektif serta efisien untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam melaksanakan fungsi organisasi mencakup perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), tindakan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Oleh karena itu, dibentuk struktur organisasi dalam rangka memperjelas pelaksanaan tugas, pengendalian peran, fungsi pimpinan dan anggota organisasi serta demi mempermudah berjalannya sistem organisasi.

Adapun susunan dan bentuk struktur organisasi IAIN Pontianak, pada unit kerja Fakultas Tarbiyah & Ilmu Keguruan, adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR PIMPINAN  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK  
2015**

**PERSONALIA :**

**1. Pimpinan Fakultas**

Dekan : Dr. Hj. Lailial Muhtifah, M.Pd.  
Wakil Dekan I : Eka Hendry AR, S.Ag.S.Pd, M.Si  
Bidang Akademik  
Wakil Dekan II Bidang : Drs. Muhammad Rahmatullah, M.Ag  
Umum dan Keuangan  
Wakil Dekan III Bidang : Dra. Hj. Rusnila, M.Si.  
Kemahasiswaan & Alumni

## **2. Jurusan Pendidikan Agama Islam**

Ketua Jurusan : H. Ma'ruf, S.Ag, M.Ag

Sekretaris Jurusan : Sukino, S.Ag, M.Ag

## **3. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab**

Ketua Jurusan : Nelly Mujahidah, S.Ag, M.S.I

Sekretaris Jurusan : Midyan Surya Ishak, S.Ag, M.P

## **4. Jurusan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah**

Ketua Jurusan : Drs. Mansur, M.Pd

Sekretaris Jurusan : Kartini, S.Ag, M.Ag.

## **5. Jurusan Pendidikan Raudhatul Anfal**

Ketua Jurusan : Nur Hamzah, S.Pd.I, M.Pd

Sekretaris Jurusan : Isyatul Mardiyati, S.Psi, M.Psi,  
Psikolog

## **6. Administrasi**

Kabag Tata Usaha : Drs. H. Sohorman AR.

Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan : Noviansyah, S.Pd.I

Kasubag Akademik, : Suyati, S.Ag

Kemahasiswaan dan Alumni

## **3. Keadaan Dosen, Karyawan dan Mahasiswa FTIK IAIN Pontianak**

### **a. Keadaan Dosen dan Karyawan**

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi di lokasi penelitian dapat diketahui bahwa jumlah dosen dan karyawan di FTIK IAIN Pontianak adalah sebanyak 100 orang terdiri dari 25 orang Dosen PNS, 25 orang Dosen Non PNS, 25

orang Karyawan PNS dan 25 orang sisanya adalah karyawan Non PNS. Adapun data jumlah Dosen dan Karyawan FTIK IAIN Pontianak secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4. 1**  
**Jumlah Dosen dan Karyawan FTIK IAIN Pontianak**

No	Status	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Dosen PNS	27	13	40
2	Karyawan PNS	3	3	6
3	Karyawan Non PNS	2	5	7
TOTAL			53	

*Sumber : Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan  
FTIK IAIN Pontianak*

**b. Keadaan Mahasiswa**

Berdasarkan data dan informasi yang di peroleh lapangan, jumlah mahasiswa FTIK IAIN Pontianak, semester Ganjil 2015/2016 adalah sebanyak 1822. Akan tetapi, data tersebut masih belum valid karena terjadi selisih antara data pada tabel dengan di absen fakultas perkelas. Hal ini mengingat dalam kegiatan perkuliahan semester kadangkala ada mahasiswa yang cuti, pindah, berhenti kuliah dan lain-lain.

Adapun rincian rekapitulasi Jumlah Mahasiswa FTIK IAIN Pontianak terdiri dari 1379 mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), 184 mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab (PBA), 202 mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) dan 57 orang mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA).

Adapun jumlah mahasiswa FTIK IAIN Pontianak untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4. 2**  
**Rekapitulasi Jumlah Mahasiswa FTIK IAIN Pontianak**  
**Tahun Akademik 2015/2016 Semester Ganjil**

No	Jurusan	Jumlah
1	Pendidikan Agama Islam	1379
2	Pendidikan Bahasa Arab	184
3	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	202
4	Pendidikan Guru Raudhatul Athfal	57
<b>J U M L A H</b>		1822

*Sumber : Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan  
IAIN Pontianak*

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

Penelitian ini dilakukan terhadap 215 sampel terdiri dari mahasiswa, dosen dan tenaga administrasi di FTIK IAIN Pontianak. Hal ini berdasarkan data yang bersumber dari bagian kepegawaian Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Pontianak tahun 2015.

Adapun penentuan sampel sebanyak 215 orang responden mengacu pada teknik pengambilan total sampling yang dikemukakan oleh Sugiyono (2012).

Selanjutnya dari hasil penelitian karakteristik responden yang berasal dari mahasiswa, dosen dan tenaga administrasi di FTIK IAIN Pontianak, peneliti sajikan dalam paparan data hasil penelitian sebagaimana berikut :

**Tabel 4.3**  
**Distribusi Responden Berdasarkan Aktivitas Pekerjaan**

No	Status	Frekuensi (n)	Persentase (%)
1	Mahasiswa	177	82,32
2	Tenaga Administrasi	10	4,66
3	Dosen	28	13,02
<b>Jumlah</b>		<b>215</b>	<b>100 %</b>

Dari data yang diperoleh pada tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 177 orang (82,32 %) responden penelitian yang berasal dari mahasiswa, 10 orang (4,66 %) berasal dari tenaga administrasi, dan dari unsur dosen di adalah 28 orang (13,02 %) responden semua sampel tersebut berasal dari lingkungan akademis FTIK IAIN Pontianak. Dari total 215 responden sampel penelitian ini. Responden terbanyak berasal dari mahasiswa yakni berjumlah 177 orang. Sedangkan, responden paling sedikit terlibat dalam penelitian ini berasal dari responden tenaga administrasi berjumlah 10 orang.

**1. Data Tentang Bagaimana *Conteks* Implementasi Standar Penilaian Akreditasi Program Studi Sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Pontianak**

Implementasi standar penilaian akreditasi program studi sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) di FTIK IAIN Pontianak terdiri atas komponen :

- a. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian.
- b. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu.
- c. Mahasiswa dan lulusan.
- d. Sumber daya manusia.

- e. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik.
- f. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi.
- g. Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama. Adapun paparan hasil pengumpulan data dan informasi penelitian berkaitan dengan *konteks*.

Pelaksanaan Standar Pendidikan dan Pembelajaran di Lingkungan FTIK IAIN Pontianak adalah sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan Standar Pendidikan dan Pembelajaran di Lingkungan FTIK IAIN Pontianak.

2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

Berdasarkan jawaban angket penelitian 162 responden pada lembar angket penelitian fakultas standar satu sebanyak 92 orang responden (56,79%) menyatakan bahwa pelaksanaan standar pendidikan dan pembelajaran di lingkungan FTIK IAIN Pontianak dalam mengimplementasikan standar penilaian akreditasi program studi sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dapat dikategorikan " Baik " .

Sedangkan responden beranggapan implementasi pada standar pendidikan dan pembelajaran 5 orang (3,09 %) responden. Untuk responden yang menjawab implementasi standar penilaian akreditasi program Studi Sarjana " Sangat Dalam " ini, terdapat 32 orang (19,75%) responden, dan 33 orang sisa (20,37%) memiliki jawaban yang berkriteria " Cukup " .

Adapun rekapitulasi hasil perhitungan distribusi responden untuk standar satu penelitian. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.4**  
**Distribusi Responden Terhadap Visi, Misi, Tujuan,**  
**Sasaran dan Strartegi Pencapaian FTIK IAIN Pontianak**

No	Harkat dan Peringkat	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat Baik	32	19,75
2	Baik	92	56,79
3	Cukup	33	20,37
4	Kurang	5	3,09
<b>Jumlah</b>		<b>162</b>	<b>100</b>

*Sumber : Rekapitulasi Jawaban Angket Penelitian Fakultas Standar Satu*

1) Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu

Dari 161 responden yang memberikan jawaban pada lembar pertanyaan angket fakultas standar dua. Terdapat 103 orang (63,97 %) responden penelitian menyatakan bahwa implementasi tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu di FTIK IAIN Pontianak beentukalan responden terendah B berkategori dengan baik yakni sebanyak 6 orang (3,73 %).

Adapun 20 orang (2,42 %) responden penelitian yang beranggapan implementasi tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan dengan " Sedangkan sisanya sebanyak 30 orang (20,37 %) responden yang dikategorikan bahwa berimplement lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.5**  
**Distribusi Responden Terhadap Tata Pamong, Kepemimpinan,**  
**Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu**

No	Harkat dan Peringkat	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat Baik	20	12,42
2	Baik	103	63,97
3	Cukup	32	19,87
4	Kurang	6	3,73
<b>Jumlah</b>		<b>161</b>	<b>100</b>

*Sumber : Rekapitulasi Jawaban Angket Penelitian Fakultas Standar Dua*

2) Mahasiswa dan lulusan

Dari 156 reponden penelitian yang mengisi pertanyaan angket fakultas standar tiga sebanyak 96 orang (58,97 %) reponden dengan menilai bahwa implementasi standar penilaian akreditasi program studi sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada komponen mahasiswa dan lulusan di FTIK IAIN Pontianak yang dikategorikan "Baik" sebanyak 43 orang (44,87%) dan dikategorikan pada penilaian suatu pelaksanaan yang terakreditasi "Cukup" sebanyak 43 orang (27,56 %).

Adapun responden dikategorikan "Baik" adalah 16 orang (10,26 %) responden dan dikategorikan "Cukup" implementasi standar penilaian akreditasi program studi sarjana pada komponen mahasiswa dan lulusan di FTIK IAIN Pontianak adalah 5 orang (3,20 %) responden.

**Tabel 4.6**  
**Distribusi Responden Terhadap Mahasiswa dan Lulusan**

No	Harkat dan Peringkat	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat Baik	16	10,26
2	Baik	92	58,97
3	Cukup	43	27,56
4	Kurang	5	3,20
<b>Jumlah</b>		<b>156</b>	<b>100</b>

*Sumber : Rekapitulasi Jawaban Angket Penelitian Fakultas Standar Tiga*

### 3) Sumber Daya Manusia

Secara umum, implementasi Sumber Daya Manusia merupakan bagian dari pelaksanaan standar penilaian akreditasi program studi sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) di FTIK IAIN Pontianak yang dikategorikan terlihat dari mayoritas suara responden penelitian dikategorikan baik sebanyak 96 orang (61,53 %) dari total 156 orang jumlah responden. Sedangkan kontribusi jumlah responden terendah adalah berkategorikan "Kurang" sebanyak 4 responden. Adapun rincian kontribusi responden penelitian sebagaimana dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.7**  
**Distribusi Responden Terhadap Sumber Daya Manusia**

No	Harkat dan Peringkat	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat Baik	28	17,95
2	Baik	96	61,53
3	Cukup	28	17,94
4	Kurang	4	2,56
<b>Jumlah</b>		<b>156</b>	<b>100</b>

*Sumber : Rekapitulasi Jawaban Angket Penelitian Fakultas Standar Empat*

#### 4) Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

Implementasi kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik sebagai komponen penilaian akreditasi program studi sarjana keenam di FTIK IAIN Pontianak. Secara umum dapat dikategorikan "Baik". Hal ini terlihat dari 121 orang (57,08 %) dari 212 total jumlah responden penilaian yang berkategori "baik".

Adapun distribusi responden terhadap "Baik" yakni 2 orang responden (responden). Selain itu, terdapat 39 orang (18,39 %) responden dikategorikan implementasi kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik di FTIK IAIN Pontianak. Sedangkan, 50 orang (23,58 %) dik

**Tabel 4.8**  
**Distribusi Responden Terhadap**  
**Pembelajaran dan Suasana Akademik**

No	Harkat dan Peringkat	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat Baik	39	18,39
2	Baik	121	57,08
3	Cukup	50	23,58
4	Kurang	2	0,94
<b>Jumlah</b>		<b>212</b>	<b>100</b>

*Sumber : Rekapitulasi Jawaban Angket Penelitian Fakultas Standar Lima*

Selain itu, berdasarkan jawaban pada angket penelitian kontribusi jawaban responden tertinggi yang memilih menjawab berkategori "Baik" pada standar pertanyaan nomor 1 tentang kompetensi lulusan Kurikulum FTIK (Kompetensi utama, pendukung, dan lainnya).

Dalam hal ini 114 responden dapat jawaban " Baik ". Sedangkan item tertinggi pada re pada standar 5 implementasi standar penilaian akreditasi program studi sarjana di FTIK IAIN Pontianak pada item no 15 penelitian tentang jumlah rata-rata pertemuan Dosen PA dalam membimbing mahasiswa dalam persemester sebanyak 45 orang dari 212 total responden dalam menjawab yang be

#### 5) Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

Secara umum, Implementasi pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi di FTIK IAIN Pontianak dapat dikategorikan " Baik ". Hal ini t jawaban responden dikategorikan baik yang menjawab pertanyaan angket fakultas standar enam mencapai 72 orang (46,45 %) dari 155 tota jumlah responden. Sedangkan, jumlah responden dikategorikan responden ber-k a t e g o r i " Kurang " i m p l e m e n dan prasana serta sistem informasi FTIK IAIN Pontianak adalah maksimal sebanyak 6 orang atau 3,87 % dari 155 total jumlah responden. Rekapitulasi jumlah responden sebagaimana dipaparkan dalam penelitian ini. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.9**  
**Distribusi Responden Terhadap Sarana dan Prasarana**  
**Sistem Informasi**

No	Harkat dan Peringkat	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat Baik	24	15,49
2	Baik	72	46,45
3	Cukup	53	34,19
4	Kurang	6	3,87
<b>Jumlah</b>		<b>155</b>	<b>100</b>

*Sumber : Rekapitulasi Jawaban Angket Penelitian Fakultas Standar Enam*

6) Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama

Berdasarkan rekapitulasi jawaban responden terdiri dari total 147 orang pada angket penelitian fakultas standar tujuh tentang implementasi penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama. Mayoritas responden sebanyak 64 orang (43,53 %) jawaban reponden yang dikategorikan " ~~Sedangkan~~, 49 orang (33,34 %) responden menjawab angket penelitian dikategorikan " Cukuk" Untuk respon deny ang ber kategori j a v Baik " sebanyak 23 orang (15,65 %) (7,48 %) responden dalam penelitian dapat dikategorikan " Kurang " implementasi penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama. Adapun kontribusi tertinggi jawaban responden berkategori " B a i k " pada penelitian pada item per u j u h pertanyaan nomor 6 tentang kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat di ling-kungan FTIK dengan 68 orang responden. Sedangkan, kontribusi jawaban responden terendah pada item pertanyaan nomor 8 tentang kerjasama FTIK IAIN Pontianak dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir yang berjumlah 37 orang responde n dengan ber k a t e g o Adapun rincian kategorisasi rekapitulasi jawaban responden penelitian untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.10**  
**Distribusi Responden Terhadap Penelitian,**  
**Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama**

No	Harkat dan Peringkat	Jumlah	Persentase (%)
1	Sangat Baik	23	15,65
2	Baik	64	43,53
3	Cukup	49	33,34
4	Kurang	11	7,48
<b>Jumlah</b>		<b>147</b>	<b>100</b>

*Sumber : Rekapitulasi Jawaban Angket Penelitian Fakultas Standar Tujuh*

## **b. Data *input* Implementasi Standar Pendidikan dan Pembelajaran di Lingkungan FTIK IAIN Pontianak**

Implementasi Standar Akreditasi BAN-PT di FTIK IAIN Pontianak adalah seluruh jajaran pimpinan dan Staf di FTIK IAIN Pontianak. Berdasarkan ketetapan Rektor IAIN Pontianak. Berdasarkan pada penelitian ini, tugas pimpinan FTIK IAIN Pontianak dalam rangka merealisasikan tujuan organisasi. Sehingga, pada pimpinan FTIK IAIN Pontianak memiliki dua tugas pokok, yaitu *administrative process* (proses administrasi), dan *task areas* (bidang garapan pendidikan).

Tugas merencanakan, mengorganisir, mengkoordinir, melakukan komunikasi, mempengaruhi, dan mengadakan evaluasi bagian komponen tugas proses. Program fakultas, siswa, personel, dana, fasilitas fisik, dan hubungan dengan masyarakat bagian komponen bidang pendidikan pada pimpinan di FTIK IAIN Pontianak.

Adapun pimpinan fakultas sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 94 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak Pasal 8 ayat 2 menyatakan bahwa "di lingkungan (1)" dipimpin oleh Dekan yang berada di bawah dan bertanggung jawab Rektor. Kemampuan memimpin organisasi pada Dekan meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, tindakan dan evaluasi. Kemampuan teknis meliputi kebijakan, pelaksanaan program kegiatan, dan laporan akuntabilitas kinerja kepemimpinan.

Selanjutnya, berdasarkan Analisis Jabatan dan Uraian Tugas (*Job Description*) FTIK IAIN Pontianak tahun 2015 tugas pokok Dekan FTIK IAIN Pontianak adalah ;

- 1) Menyusun dan melaksanakan rencana strategis yang dicapai dalam masa jabatan,

- 2) Menyusun program kerja dan anggaran tahunan fakultas,
- 3) Melaksanakan pengembangan pendidikan tinggi sesuai kompetensi,
- 4) Mengkoordinasikan dan memantau kegiatan pendidikan,
- 5) Mengkoordinasikan dan memantau penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni,
- 6) Mengkoordinasikan dan memantau kegiatan pengabdian kepada masyarakat,
- 7) Melaksanakan kerja sama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di dalam dan luar negeri,
- 8) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain,
- 9) Mengusulkan pemberian gelar doktor dengan persyaratan sesuai peraturan yang berlaku dalam pertimbangan senat fakultas,
- 10) Melaksanakan pembinaan civitas akademika,
- 11) Melaksanakan urusan tata usaha, dan
- 12) Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rektor setelah mendapat penilaian Senat Fakultas.

Tugas pokok sebagai dalam analisis jabatan dapat diuraikan menjadi bagian tugas Dekan FTIK IAIN Pontianak meliputi;

1. Memimpin Fakultas dengan tugas penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat,
2. Membina tenaga pendidikan, kependidikan, mahasiswa,
3. Merumuskan kebijaksanaan dengan persetujuan senat fakultas sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
4. Merumuskan saran-saran yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan/ pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi,
5. Menyusun rencana strategis dan program kerja fakultas sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
6. Membagi tugas langsung sesuai bidang tugas,
7. Memberi arahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas,

8. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas agar terjalin kerjasama,
9. Membina Pejabat untuk meningkatkan kemampuan dan disiplin,
10. Mengawasi pelaksanaan tugas pejabat agar pelaksanaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pejabat untuk mengetahui permasalahan dan penanggulangan,
12. Menilai prestasi kerja pejabat dalam rangka pembinaan karir, menetapkan kebijaksanaan operasional dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi,
13. Menjalin dan membina kerjasama dengan instansi/lembaga badan swasta dan masyarakat,
14. Membina dosen, mahasiswa, tenaga administrasi fakultas untuk meningkatkan kemampuan,
15. Memberikan pelayanan terhadap lembaga/instansi dan masyarakat dalam bidang tugas,
16. Menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tugas untuk penjabaran dalam pelaksanaan,
17. Melaksanakan tugas pembinaan aparatur,
18. Memimpin urusan kerjasama dengan lembaga, perusahaan dan instansi terkait,
19. Menyusun laporan Fakultas sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pada tiap waktu, dan
20. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan bidang tersebut.

Adapun tugas Dekan FTIK IAIN Pontianak di bidang administrator berdasarkan wawancara penelitian tanggal 20 Oktober 2015 adalah sebagai berikut :

*" Selaku pimpinan fakultas saya kebenaran, ketepatan rencana dan program kerja fakultas dengan rencana strategis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) serta dapat mencapai target yang ditetapkan termasuk terselenggara kegiatan Tri*

*Dharma Perguruan Tinggi, terbina-nya tenaga pendidik (dosen), tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta menjamin terselenggara kelancaran layanan bidang administrasi, kepegawaian hingga bidang kemahasiswaan di lingkungan fakultas. "*

Berdasarkan penjelasan di atas fungsi tugas Dekan FTIK IAIN Pontianak sebagai administrator, meliputi:

- a) Membuat perencanaan.
- b) Membuat perencanaan merupakan syarat mutlak untuk setiap organisasi baik perseorangan maupun kelompok. Karena, tanpa perencanaan pelaksanaan kegiatan akan mengalami kesulitan. Sesuai dengan ruang lingkup administrasi fakultas program tahunan yang dikenal dengan rencana strategis tahunan (Renstra).

Rencana strategi ini menjadi indikator kinerja utama dalam suatu organisasi. Sehingga, renstra ini berkaitan dengan *outcome* yang tercapai. Dari pandangan itu renstra memiliki indikator beberapa di antaranya;

- 1) Indikator Input berisi gambaran mengenai sumber daya untuk menghasilkan *output* dan *outcome*,
- 2) Indikator proses berisi gambaran mengenai langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang,
- 3) Indikator *output* berisi gambaran mengenai *output* dalam bentuk barang yang dihasilkan dari kegiatan,
- 4) Indikator *outcome* berisi gambaran mengenai hasil aktual dari barang yang dihasilkan, dan
- 5) Indikator dampak adalah indikator *outcome* pada tingkat tertinggi. Dengan demikian, Indikator berisi gambaran mengenai akibat langsung/ tidak langsung tercapai suatu tujuan.

Selain itu, dalam melaksanakan tugas manajerial dekan hendaknya melaksanakan kegiatan pengelolaan kepegawaian. Pengelolaan kepegawaian mencakup penerimaan, dan penempatan dosen/ karyawan

fakultas, pembagian tugas pekerjaan dosen dan karyawan, kesejahteraan dosen dan karyawan, dan sebagainya.

Adapun dalam membagi tugas pekerjaan personil, dekan memperhatikan kesesuaian antara beban dan jenis tugas, serta kemampuan pelaksanaan.

Di samping itu, Dekan sebagai administrator memiliki hubungan sangat erat dengan berbagai aktifitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, menyusun, dan dokumen seluruh program fakultas. Sebagai administrator, dekan harus memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan mengembangkan semua fasilitas baik sarana maupun prasarana pendidikan.

Dekan sebagai administrator pendidikan menerapkan kemampuan tugas operasional yakni kemampuan pengelola kurikulum, pengelola administrasi peserta didik, pengelola personalia, pengelola sarana prasarana, pengelolaan administrasi kearsipan, dan pengelola administrasi keuangan.

Peran dekan sebagai administrator dapat dilihat pada kemampuan pengelolaan kurikulum, pengelolaan personalia, pengelolaan sarana prasarana, pengelolaan administrasi kearsipan, dan pengelolaan administrasi keuangan.

Aspek-aspek kurikulum harus dikuasai oleh dekan sebagai supervisor adalah;

- a) Materi kuliah,
- b) Proses belajar mengajar,
- c) Evaluasi kurikulum,
- d) Pengelolaan kurikulum, dan
- e) Pengembangan kurikulum

Adapun upaya yang dilakukan Dekan FTIK IAIN Pontianak dalam rangka mewujudkan standar pendidikan dan pembelajaran di Lingkungan saat diwawancarai menyatakan bahwa :

*"Dalam melaksanakan tugas sebagai pimpinan FTIK IAIN Pontianak saya selalu berkoordinasi dengan Wakil Dekan I, II dan III. Apalagi penerapan Standar Penilaian Akreditasi Program Studi Sarjana program telah disusun. Kemudian, saya mengawasi pelaksanaannya dan saya pastikan terealisasi dengan baik sesuai dengan peraturan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan."*

Apa yang disampaikan oleh pimpinan FTIK IAIN Pontianak di atas menunjukkan koordinasi di FTIK IAIN Pontianak antara Dekan dengan wakil Dekan berjalan dengan baik. Adapun pemaknaan wakil Dekan FTIK IAIN Pontianak sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 94 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak Pasal 15, Pasal 14 terdiri atas:

- 1) Wakil Dekan Bidang Akademik memiliki tugas membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan memiliki tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, pelaksanaan anggaran, akuntansi, pelaporan keuangan, pengelolaan sarana prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan; serta
- 3) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama me-miliki tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan dibidang kemahasiswaan dan kerjasama.

Secara umum peran dekan selain menjalankan fungsi manajerial juga melakukan kegiatan administrator dan supervisor. Tugas supervisor adalah kegiatan supervisi. Salah satu fungsi pokok dalam administrasi pendidikan bukan hanya tugas pekerjaan dan pengawas.

Akan tetapi, tugas dekan terhadap dosen dan pegawai di fakultas. Oleh sebab itu, Dekan hendaknya cerdas dan bijak dalam pilah-memilah untuk menentukan syarat yang diperlukan untuk kemajuan fakultas. Sehingga, tujuan pendidikan di fakultas dapat tercapai.

Di sisi lain, Tanggung jawab dekan sebagai supervisor pendidikan berat dan kompleks. Dekan bukan hanya kepala pimpinan tanpa pekerjaan yang menandatangani surat administrasi tetapi harus berpikir atas kemajuan fakultas khususnya dalam bidang pembinaan kurikulum. Tugas dekan sebagai supervisor sangat penting dimana s e b a g a i f a k t a g i s y a n t u k t r a n e n t u k fakultas.

Beberapa langkah dalam kepemimpinan pendidikan antara lain;

- a. Membimbing dosen dalam memilih metode mengajar,
- b. Membimbing dan mengarahkan dosen dalam pemilihan bahan pelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik dan tuntutan kehidupan masyarakat,
- c. Mengadakan kunjungan kelas untuk observasi saat dosen mengajar dan didiskusikan dengan dosen,
- d. Pada awal tahun pelajaran baru mengarahkan penyusunan silabus sesuai dengan kurikulum,
- e. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membawa kurikulum pelaksanaan di sekolah,
- f. Setiap akhir pelajaran menyelenggarakan penilaian bersama terhadap program fakultas.

Tugas Dekan sebagai supervisor untuk meningkatkan pengawasan, pengendalian terhadap dosen, karyawan dan personil lain untuk meningkatkan kinerja dosen. Dekan bertugas mengatur seluruh aspek kurikulum berlaku di fakultas sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun peran utama dekan sebagai supervisor adalah Menyusun dan melaksanakan program supervisi pendidikan, serta memanfaatkan hasil

yang diwujudkan dalam program supervisi kelas, kegiatan ekstrakurikuler, serta peningkatan kinerja tenaga kependidikan.

### **c. Data tentang proses Pelaksanaan Implementasi Standar Pendidikan dan Pembelajaran di Lingkungan FTIK IAIN Pontianak**

Tenaga Administrasi FTIK IAIN Pontianak ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak Pasal 22 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa;

- 1) Bagian tata usaha pada pasal 12 huruf d merupakan unsur pelaksanaan administrasi fakultas,
- 2) Bagian tata usaha sebagaimana pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala pimpinan dan bertanggung jawab terhadap Dekan.

Pada pasal 23 menyatakan bahwa bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, akademik, mahasiswa, perencanaan, keuangan dan pelaporan di lingkungan Fakultas.

Sedangkan, Pasal 24 menyatakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam pasal 22 ayat 1 tentang bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan rencana program;
- b) Pelaksanaan urusan keuangan;
- c) Pelaksanaan administrasi akademik, mahasiswa dan alumni;
- d) Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan sistem informasi;
- e) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumah tanggaan dan pengelolaan barang milik negara; dan
- f) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fakultas.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di FTIK IAIN Pontianak yang dipimpin oleh Drs. H. Sohorman AR sebagai Kepala Bagian Tata Usaha FTIK IAIN Pontianak.

Adapun uraian tugas Kabag TU FTIK IAIN Pontianak sebagaimana tertera dalam Analisis Jabatan dan Uraian Tugas (*job description*) tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Tata Arsip, Tata Surat, Statistik dan pelaporan pada fakultas.
2. Melaksanakan administrasi perlengkapan dan inventaris barang milik negara.
3. Melaksanakan administrasi kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat.
4. Melakukan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan.
5. Memberikan layanan teknis di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan kerumahtanggaan.
6. Menilai prestasi kinerja akademis sebagai bahan pembinaan karir.
7. Melaksanakan tugas lain.
8. Melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas tersebut.

Pelaksanaan tugas Kabag TU dibantu oleh Kepala sub bagian Administrasi Umum & Keuangan yaitu Noviansyah, S.Pdi dan Kepala Sub bagian Akademik Kemahasiswaan & Alumni yaitu Suyati, S.Ag. Adapun tujuan dari pelaksanaan tugas untuk ketercapaian tujuan organisasi Kabag TU dibantu oleh 9 orang staf fakultas berstatus Pegawai Negeri Sipil dan tenaga kontrak (*honoror*).

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi diketahui bahwa tenaga Administrasi atau tata usaha sebagai tenaga kependidikan yang bertugas membantu fakultas dalam urusan administrasi antara lain kegiatan dalam pengembangan kualitas FTIK IAIN Pontianak seperti pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis. Dengan kata lain Tenaga Administrasi FTIK IAIN Pontianak bertugas sebagai pendukung proses pendidikan di kampus melalui layanan administratif dengan terselenggara kependidikan yang efektif dan efisien.

Peran lain dari kinerja Tenaga Administrasi sebagai staf di FTIK IAIN Pontianak berpengaruh dalam implementasi standar penilaian akreditasi program studi sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Peran kinerja ini dapat diaplikasikan sebagaimana Staf tata usaha berperan sebagai administrator. Ketika di rumah berperan sebagai kepala rumah dan berperan sebagai anggota rapat di suatu organisasi serta berperan sebagai pemain dalam salah satu cabang olah raga.

Berdasarkan hasil penelitian, administrasi tata usaha di FTIK IAIN Pontianak dikategorikan sangat baik. Dengan demikian, Badan Nasional Akreditasi Perguruan Tinggi (BNA-PT) pada tahun 2014 memberikan akreditasi sebagai FTIK IAIN Pontianak. Adapun kelemahan staf administrasi FTIK IAIN Pontianak, yaitu keterlibatan staf dalam memberikan ide atau gagasan untuk kemajuan lembaga tersebut dan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas kerja organisasi. Pelaksanaan tugas kepala tata usaha membutuhkan saran dan kritik dari staf administrasi agar tugas administrasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Berdasarkan penelitian, staf administrasi belum memberikan kontribusi tugas dengan semestinya.

Berdasarkan hasil penelitian dengan Kepala Bagian Tata Usaha FTIK IAIN Pontianak, Drs. H. Sohorman AR tanggal 21 Oktober 2015 menyatakan bahwa :

*"Saat ini tidak banyak ide-ide baru yang saya peroleh dalam beberapa tahun terakhir terkait pengembangan sistem administrasi fakultas, apa yang ada disini dilakukan sesuai dengan analisis job **description**, perubahan baru mengikuti instruksi atasan yang lebih*

Selain itu, dari hasil wawancara peneliti informasi perkembangan standar penilaian akreditasi program studi sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) di FTIK IAIN Pontianak adalah :

*"Pelaksanaan pekerjaan staf dalam mewujudkan Standar Penilaian Akreditasi Program Studi Sarjana FTIK IAIN Pontianak. Hingga saat ini sudah berjalan dengan baik meskipun masih ada kekurangan seperti prosedur kerja, pelayanan yang belum maksimal sesuai dengan bidang tugas. Hal ini dikarenakan masih kekurangan karyawan, sehingga sebagian besar pekerjaan menumpuk pada staf-staf tertentu" .*

Di samping itu, peran dan kinerja tenaga administrasi adalah sebagai berikut :

- a) Kekurangan tenaga administrasi yang memiliki kemampuan, kecakapan dan keahlian dengan bijak terhadap tugas tersebut;
- b) Mutu dan kinerja tata usaha masih rendah;
- c) Rendah disiplin, loyalitas dan tanggung jawab tenaga administrasi dalam menjalankan tugas;
- d) Kurangnya tindakan yang mencerminkan pelayanan prima kepada mahasiswa, orang tua dan masyarakat;
- e) Kurangnya kecerdasan emosional, spritual dan kecerdasan intelektual sebagai tenaga administrasi.

Adapun salah satu tindakan dilakukan fakultas melakukan pengawasan. Pengawasan merupakan suatu proses kegiatan untuk memantau, mengukur dan melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga perencanaan dapat tercapai dengan tujuan. Mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi mutlak. Pelaksanaan

program tanpa diiringi dengan sistem pengawasan yang berkesinambungan. Salah satu bentuk pengawasan organisasi untuk membentuk kegiatan agar dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan pengawasan diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 menyatakan bahwa pengawasan adalah serangkaian kegiatan sebagai pengendalian terhadap kinerja secara preventif agar pelaksanaan berjalan dengan efektif dan efisien.

#### **d. Data Tentang Produk Implementasi Standar Nasional Pendidikan Tinggi di Lingkungan FTIK IAIN Pontianak**

Berdasarkan penelitian ini bahwa FTIK IAIN dalam merealisasikan Standar BAN-PT menetapkan kebijakan Job Diskription yang disepakati oleh Fakultas di mana semua kegiatan Administrasi terpusat dibawah Kabag dan Kasubbag Akademik FTIK IAIN Pontianak. Dengan demikian, acuan program pelaksanaan IAIN Pontianak data hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Dekan FTIK IAIN Pontianak, Dr. Hj. Lailial Muhtifah, M. Pd saat diwawancara peneliti pada tanggal 20 Oktober 2015, menyatakan bahwa :

" Banyak kendala yang di h yang telah di tetapkan BAN-PT, apalagi FTIK IAIN Pontianak hingga saat ini masih berbenah menuju **world class faculty**. Namun resistensi dari masyarakat yang kurang peduli terhadap perkembangan FTIK IAIN Pontianak serta adanya keraguan dari beberapa **stakeholder** terhadap proyek perubahan menjadi faktor penghambat terealisasi akreditasi BAN-PT dengan ni l a i A "

Dari penjelasan diatas diketahui bahwa FTIK IAIN Pontianak dapat memperbaiki kinerja sesuai dengan standar penilaian akreditasi program studi sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Berdasarkan hasil penelitian, secara umum peneliti menemukan perihal yang dilaksanakan FTIK IAIN Pontianak untuk mengatasi kendala dalam mengimplementasikan Standar BAN-PT dapat meningkatkan mutu pelayanan di FTIK IAIN Pontianak.

Secara umum dapat dipaparkan sebagai berikut :

- a) Sosialisasi dan pembinaan tentang teknis maupun pelaksanaan standar penilaian akreditasi program studi sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Pejabat FTIK.

Sosialisasi dan pembinaan terhadap implementasi standar penilaian akreditasi program studi sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dilakukan oleh FTIK melakukan pertemuan Fakultas setiap awal bulan dalam acara *Coffe Morning*, dan melakukan rapat koordinasi dengan kebijakan yang dilaksanakan Fakultas.

- b) Pembinaan tentang peningkatan pemahaman tenaga administrasi dan dosen dengan implementasi standar penilaian akreditasi program studi sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Perbedaan persepsi dari civitas akademika tentang konsep implementasi standar penilaian akreditasi program studi sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) di FTIK IAIN Pontianak dalam mengelola Fakultas adanya kendala semestinya diperbaiki.

Adapun kebijakan dekan FTIK IAIN Pontianak melakukan sarana bagi seluruh unsur Pejabat, Dosen dan Staf Administrasi untuk mengkomunikasikan dan mengakses tentang Penyelenggaran

Fakultas Berbasis Akreditasi seperti (memfasilitasi dosen dengan program penulisan jurnal dosen dan jurnal mahasiswa, mengadakan kelompok diskusi dosen, memfasilitasi seluruh jurusan untuk berpartisipasi Asosiasi Jurusan Tingkat Nasional, melakukan workshop untuk meningkatkan kemampuan dosen memahami kurikulum berbasis KKNI dan penyusunan silabus, menyediakan Whats App Group Talas sebagai wadah Dosen FTIK berkomunikasi, Facebook FTIK.

- c) Menyusun Program Kerja Jurusan dan Fakultas yang mengacu pada Standar BAN-PT.

Pendanaan penyelenggaraan pendidikan di FTIK IAIN Pontianak sebesar Rp 2.167680,000 (Dua Miliar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah). Anggaran tahun 2016 penyelenggaraan kegiatan dengan Standar BAN-PT. Kegiatan pendanaan DIPA, Fakultas dapat mengembangkan program kerjasama dengan Pemerintah daerah di Kalimantan Barat seperti Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Pontianak, Kemenag Kota Pontianak untuk Program Pembinaan Kompetensi guru PAI baik SD/MI hingga SMA/MA.

Di samping itu, FTIK memperoleh dari Kemenag Pusat untuk menyelenggarakan Program Kualifikasi bagi Guru PAI dengan Diploma Dua dan Aliyah serta menjadi mitra UIN Jakarta untuk program PLPG bagi guru RA,MI dan PAI dibawah Kemenag serta mitra kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk program PLPG bagi Guru PAI SD hingga SMA dibawah naungan Diknas.

- d) Tenaga Pengajar

Tenaga pengajar di FTIK IAIN Pontianak jumlahnya ideal sehingga FTIK mengadakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi Lain seperti IKIP PGRI, dosen, FKIP Untan, Universitas Muhammadiyah Pontianak, Instansi Pemerintah dan para praktisi

yang berkompetensi dengan tenaga Dosen di Jurusan di FTIK IAIN Pontianak terutama Jurusan PGMI dan PGRA.

FTIK mengusulkan penambahan jumlah tenaga pengajar dengan cara mempekerjakan dosen tambahan atau dosen luar biasa. Akan tetapi, tidak semaksimal dosen tetap yang *standby* di FTIK IAIN Pontianak.

e) Sarana Prasarana

Sarana prasarana memiliki peran penting untuk mempermudah kelancaran kegiatan di FTIK IAIN Pontianak. Akan tetapi, saat ini sarana prasarana masih terbatas dan pengadaaan/penambahan dalam proses pembangunan.

Adapun kendala dalam kelancaran kegiatan implementasi standar penilaian akreditasi program studi sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) di 2015 namun FTIK di Tahun 2016 memperoleh lampu hijau untuk kelengkapan Sarana prasarana Pembelajaran.

## **2. Temuan Khusus Penelitian**

Adapun temuan khusus permasalahan penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Manajemen Kurikulum dan Program Pengajaran,
- b) Materi di antaranya materi kurikulum inti sebesar 65% ditingkat pusat dan materi kurikulum muatan lokal sebesar 35% ditingkat fakultas berdasarkan potensi lingkungan. Pedoman dan kisi-kisi soal disusun ditingkat pusat dengan kategori cukup.
- c) Perencanaan PBM dapat dilihat secara terperinci diantaranya adanya rencana pembelajaran semester dan perumusan tujuan.
- d) Pelaksanaan PBM di FTIK IAIN Pontianak meliputi pengarsipan metode dan media. Media dalam pembelajaran sebagai pemanfaatan sumber belajar, suasana pembelajaran, aktivitas dosen di kelas, aktifitas mahasiswa belajar di kelas.

- e) Evaluasi PBM dikategorikan baik dengan cara melakukan pretest dan post test setiap kali tatap muka, mengumumkan hasil penilaian secara terbuka dan transparan, serta evaluasi materi pada pertemuan sebelumnya yang belum dikuasai mahasiswa.
- f) Manajemen Mahasiswa  
Dalam manajemen pembelajaran dibutuhkan aktifitas yang terkait pada kondisi fisik, emosional. Kegiatan pembelajaran mencakup pencatatan dan tata pelaksanaan kesiswaan dalam bentuk pangkalan data Perguruan Tinggi (PDPT) bimbingan dan pembinaan disiplin mahasiswa meliputi bimbingan dan bantuan baik emosional, sosial dan bertanggung jawab.
- g) Manajemen Ketenagaan  
Pelaksanaan manajemen ketenagaan FTIK IAIN Pontianak, dikategorikan cukup dari perencanaan pegawai yang dianalisis pekerjaan (*job analysis*) dan analisis jabatan untuk memperoleh deskripsi pekerjaan (gambaran tentang tugas tersebut). Selain itu, evaluasi kinerja pegawai dilakukan secara obyektif dan akurat yang difokuskan pada prestasi individu dan peran kegiatan fakultas.

# **BAB V**

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan berbagai pemaparan dan penjelasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Implementasi Standar Nasional Perguruan Tinggi di Lingkungan FTIK IAIN Pontianak berjalan dengan " baik " mana hasil rekapitulasi angket penelitian yang menunjukkan jawaban respon dari para responden terhadap 7 standar implementasi standar penilaian akreditasi program studi sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sebagai berikut:
  - a) Visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sebanyak 56,79 % responden dikategorikan baik,
  - b) Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu sebanyak 63,97 % responden dikategorikan baik,
  - c) Mahasiswa dan lulusan sebanyak 58,97 % responden dikategorikan baik,
  - d) Sumber daya manusia sebanyak 61,53% responden dikategorikan baik,

- e) Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik sebanyak 57,08 % responden dikategorikan baik,
  - f) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi sebanyak 46,45 % dikategorikan baik dan sebagai komponen,
  - g) Penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama sebanyak 43,53 % responden berjalan dengan baik.
2. Upaya pimpinan FTIK dalam rangka mewujudkan pelaksanaan standar pendidikan dan pembelajaran di lingkungan FTIK IAIN Pontianak berjalan dengan baik. Pelaksanaan tugas dan fungsi kepemimpinan sesuai dengan administrator dan supervisor dalam Analisis Jabatan dan Uraian Tugas (*Job Description*) tahun 2015 di FTIK IAIN Pontianak. Namun fungsi dan kemampuan ini tidak didukung dengan keadaan organisasi serta sumber daya. Sehingga, program telah disusun tidak dapat digeneralisasikan dengan baik.
3. Kesiapan tenaga administrasi dalam rangka mendukung implementasi standar pendidikan dan pembelajaran di lingkungan FTIK IAIN Pontianak belum berjalan dengan maksimal. Adapun penyebabnya adalah sebagai berikut :
- a) Kekurangan tenaga administrasi yang memiliki kemampuan, kecakapan dan keahlian dengan bijak terhadap tugas tersebut;
  - b) Mutu dan kinerja tata usaha masih rendah;
  - c) Rendah disiplin, loyalitas dan tanggung jawab tenaga administrasi dalam menjalankan tugas;
  - d) Kurangnya tindakan yang mencerminkan pelayanan prima kepada mahasiswa, orang tua dan masyarakat;
  - e) Kurangnya kecerdasan emosional, spritual dan kecerdasan intelektual sebagai tenaga administrasi.

Kendala di FTIK IAIN Pontianak mengimplementasikan Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebabkan beberapa di antaranya :

- a) Kurangnya Sosialisasi dan pembinaan tentang teknis maupun pelaksanaan standar penilaian akreditasi program studi sarjana

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Pejabat FTIK.

- b) Pembinaan tentang peningkatan pemahaman tenaga administrasi dan dosen dengan implementasi standar penilaian akreditasi program studi sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
- c) Keterbatasan pendanaan,
- d) Kurangnya tenaga pengajar,
- e) Sarana prasarana kurang memadai, dan
- f) Akses informasi tidak terjangkau di kampus.

## **B. Saran**

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi lembaga perguruan tinggi agar dapat meningkatkan kinerja tenaga pendidik dan administrasi dalam rangka mengimplementasikan standar penilaian akreditasi program studi sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Upaya ini diperoleh dengan memberikan penghargaan (*reward*) maupun hukuman (*punishment*) kepada karyawan.
2. FTIK IAIN Pontianak agar dapat meningkatkan kerjasama dengan pihak yang terkait baik internal maupun eksternal. Kerjasama internal berupa koordinasi dan penyamaan persepsi antara tenaga administrasi, dosen dan pimpinan tentang implementasi standar penilaian akreditasi program studi sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang sebenarnya. Sedangkan secara eksternal FTIK IAIN Pontianak dapat memberikan kontribusi para pakar dibidangnya untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap seluruh karyawan, dosen dan pimpinan FTIK di tingkat bawah (*lower manager*) hingga tingkat atas (*top manager*) tentang petunjuk teknis maupun standar pelaksanaan standar penilaian akreditasi program studi sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).



## **Daftar Pustaka**

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta.
- Budiman, Arief. 2006. *Kebebasan Negara Pembangunan*. Jakarta: Pustakan Alvabet dan Freedom Institue.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Farida, Tayibnapis, Yusuf. 2008, *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Hasan, Iqbal. 2006. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi kebijakan dan Politik*. Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya.

- Imron, Ali. 1995. *Kebijakan Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Indra, Bastian. 2007. *Iakutansi Yayasan dan :Lembaga Publik*. Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pertama.
- Iqbal Hasan. 2002. *Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- John W. Cresweel. 1994. *Design Research Kuantitatif Kualitatif dan mixed*. New York Academic Press.
- Kusrini dan Andri Koniyo. 2007. *Tuntutan Praktis Membangun Sistem Informasi Akutansi den Visual Basic dan Microsoft Sgr. Server*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Pontianak. *Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAIN Pontianak 2014*. IAIN Pontianak.
- Imron, Ali. 1995. *Kebijakan Pendidikan di Indonesia, Proses, Produk dan Masa Depan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Makinuddin, Tri Hardiyanto S. 2006. *Analisis Sosial: Bersaksi dalam Advokasi Irigasi*. Bandung: Akatiga.
- Muis, Fahrur. 2011. *Bencana Akhir Zaman*. Kuala Lumpur, Malaysia: BS. Print Sdn. Bhd.
- Nasution. 1996. *Metode Riset*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Noeng Muhajir. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake sarasin. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu UNIMUS.

- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Purwoto, Agus. 2007. *Panduan Laboratium Statistik Inferensial*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rohman Arif. 2009. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Ruky, Achmad S. 2006. *Manajemen Penggajian & Pengupahan Untuk Karyawan Perusahaan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sarjono, Haryadi dan Winda Julianita. S2011. *PSS vs LISREL: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Sudjana, Nana. 2001. *Penelitian dan Penilaian*. Bandung: Sinar Baru.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Pusat Bahasa Depdiknas.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitaif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.

- Starratt, Robert J. 1995. *Menghadirkan Pemimpin Visioner*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tilaar, H.A.R. 2008. *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Usman, Nurdi. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta PT. Raja Graofindo Persada.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: PT. Buku Kita.
- Yatim Riyanto. 2001. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Penerbit SIC.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Analisis Jabatan dan Uraian Tugas (*Job Description*). 2015. Fakultas Tarbiyah & Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak.

Buku V Pedoman Penilaian Akreditasi Program Studi Sarjana. 2008. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Jakarta.

Direkterat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2003. Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Jakarta.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.





# IMPLEMENTASI STANDAR PENILAIAN AKREDITASI PRODI

Muhammad Rahmatullah - Eka Hendry AR  
Mansur - Isyatul Mardiyati - Midyan Surya Ishak

Editor :  
Muhamad Tisna Nugraha



ISSN 978-602-61365-0-9



9 786026 136909